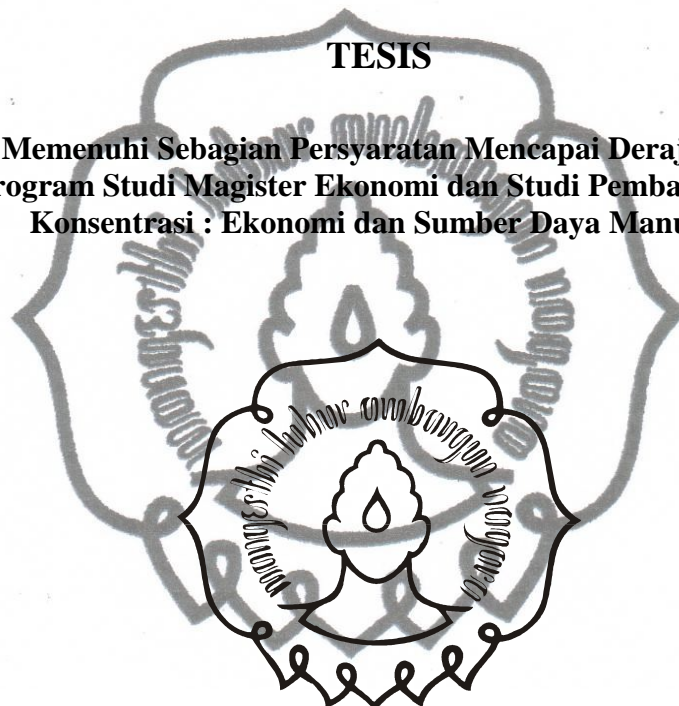


**ANALISIS PENGARUH PARTISIPASI ANGGOTA,  
KUALITAS PENGURUS DAN PERANAN PEMERINTAH  
TERHADAP SISA HASIL USAHA  
KOPERASI WANITA DI KABUPATEN NGAWI  
(Studi Kasus Koperasi Wanita Penerima Dana Hibah  
Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro  
dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009)**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister  
Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan  
Konsentrasi : Ekonomi dan Sumber Daya Manusia**



Oleh :

**SRI WIYANTI  
S 4210052**

**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN  
SURAKARTA**

**2011**  
*compu user*

**Halaman Persetujuan Pembimbing**

**ANALISIS PENGARUH PARTISIPASI ANGGOTA,  
KUALITAS PENGURUS DAN PERANAN PEMERINTAH  
TERHADAP SISA HASIL USAHA  
KOPERASIWANITA DI KABUPATEN NGAWI  
(Studi Kasus Koperasi Wanita Penerima Dana Hibah  
Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro  
dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009)**

Disusun Oleh  
**SRI WIYANTI**  
**S 4210052**

Telah disetujui oleh Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**DR. Ir. KUSNANDAR, M. Si**  
NIP. 19670703 199203 1 004

  
**SURYANTO, SE, M. Si**  
NIP. 19750122 200812 1 002

Ketua Program Studi  
Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan

  
**Dr. AM. SUSILO, M.S**  
NIP. 19590328 198803 1 001

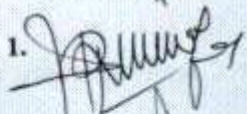
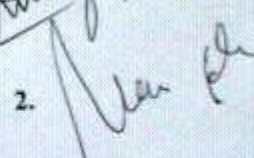
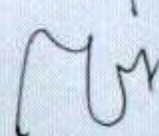
### Halaman Persetujuan Penguji

**ANALISIS PENGARUH PARTISIPASI ANGGOTA,  
KUALITAS PENGURUS DAN PERANAN PEMERINTAH  
TERHADAP SISA HASIL USAHA  
KOPERASIWANITA DI KABUPATEN NGAWI  
(Studi Kasus Koperasi Wanita Penerima Dana Hibah  
Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro  
dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009)**



Disusun Oleh  
**SRI WIYANTI**  
S 4210052

Telah disetujui oleh Tim Penguji

Pada Tanggal : 12 Januari 2012

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Tim Penguji	DR. EVI GRAVITIANI, MSi	1. 
Pembimbing Utama	DR. Ir. KUSNANDAR, M. Si	2. 
Pembimbing Pendamping	SURYANTO, SE, M. Si	3. 

 <b>Prof. Dr. Ir. AHMAD YUNUS, M.S</b> NIP. 19610717 198601 1 001	Ketua Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan  <b>Dr. AM. SUSILO, M.S</b> NIP. 19590328 198803 1 001
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : SRI WIYANTI

NIM : S 4210052

Program Studi : Magister Ekonomi Dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Sumberdaya Manusia dan Pembangunan

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil karya orang lain.

Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan Penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam tesis ini dan disebutkan sebagai Daftar Pustaka.

Demikian surat pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

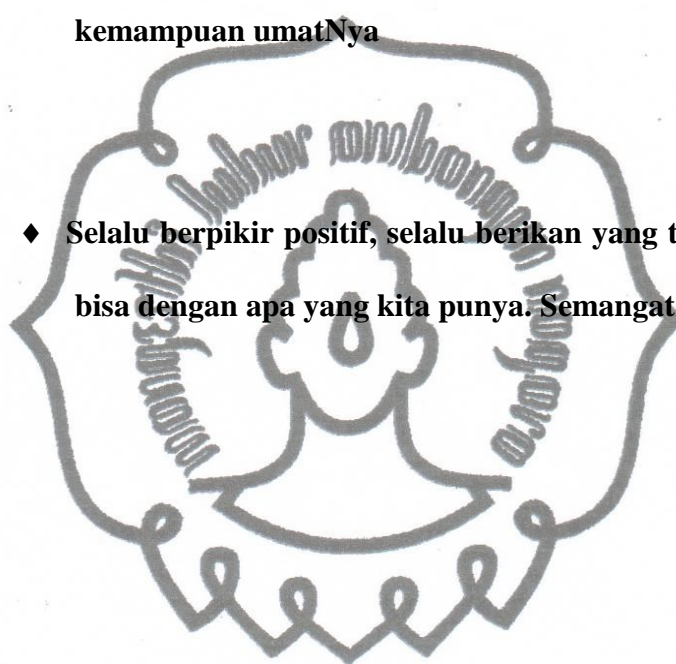
Surakarta,



METERAI  
TEMPEL  
Rp. 6000  
DD77CAAF428905414  
6000  
DJI  
SRI WIYANTI  
S4210052

## MOTTO

- ◆ Allah SWT tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan umatNya

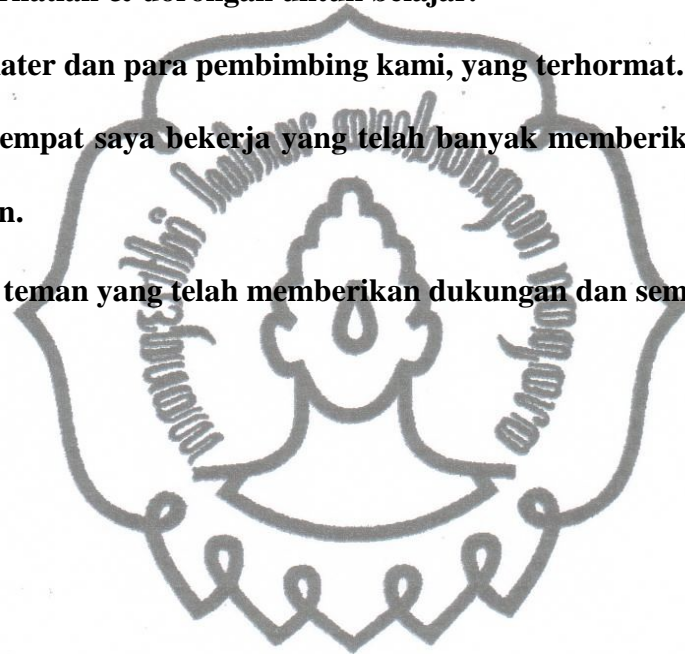


- ◆ Selalu berpikir positif, selalu berikan yang terbaik yang kita bisa dengan apa yang kita punya. Semangat!

## PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan kepada :

1. Suami dan anak-anakku tercinta yang senantiasa selalu mencurahkan doa, perhatian & dorongan untuk belajar.
2. Almamater dan para pembimbing kami, yang terhormat.
3. Dinas tempat saya bekerja yang telah banyak memberikan motivasi dan harapan.
4. Teman teman yang telah memberikan dukungan dan semangat.



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan Tesis dengan judul “ Analisis Pengaruh Partisipasi Anggota, Kualitas Pengurus, dan Peranan Pemerintah Terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Wanita Di Kabupaten Ngawi. (Studi Kasus Koperasi Wanita Penerima Dana Hibah Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009)”.

Penulisan tesis ini berguna sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pasca sarjana program studi magister ekonomi study pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dengan penuh kerendahan hati, penyusun menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang langsung maupun tidak langsung, turut andil dan memotivasi penyelesaian tesis ini, antara lain kepada :

1. Bapak Dr. Ir. KUSNANDAR, MSi selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan dan saran dalam penelitian ini.
2. Bapak SURYANTO, SE, MSi selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan dan saran dalam penelitian ini.
3. Bapak Dr. JJ. Sarunggu, MS selaku Ketua program Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

4. Bapak Ibu Dosen yang telah memberikan masukan bekal ilmu pengetahuan bagi penulis selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Segenap Civitas Akademika seluruh karyawan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surskarta yang telah membantu terselesainya tesis ini.
6. Bapak Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi yang telah memberikan data yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini.
7. Teman-teman dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian dan penulisan tesis ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan tesis ini, namun demikian penulis selalu menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kebaikan dan kesempurnaan di waktu yang akan datang. Harapan penulis semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, Desember 2011

Penulis

Sri Wiyanti



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
ABSTRAK.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Kajian Teoritis.....	11
2.1.1 Tinjauan Koperasi Secara Umum .....	11
2.1.1.1 Pengertian Koperasi .....	11
2.1.1.2 Fungsi dan Peran Koperasi .....	13
2.1.1.3 Jenis-jenis Koperasi .....	14
2.1.1.4 Perangkat Organisasi Koperasi .....	15
2.1.2 Partisipasi Anggota Koperasi.....	18

2.1.3	Kualitas Pengurus .....	28
2.1.4	Peranan Pemerintah.....	31
2.1.5	Keberhasilan Usaha Koperasi .....	36
2.1.6	Sisa Hasil Usaha Koperasi .....	38
2.2	Kajian Empiris .....	42
2.3	Kerangka Konseptual.....	45
2.4	Hipotesis .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>47</b>
3.1	Tipe Penelitian .....	47
3.2	Unit Analisis .....	47
3.3	Teknik Pengambilan Sampel .....	48
3.4	Sumber dan Metode Pengumpulan Data.....	50
3.5	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	51
3.6	Teknik Analisis Data .....	54
3.6.1	Analisis Data dengan Metode Statistik .....	55
3.6.1.1	Uji Signifikansi Secara Parsial ( Uji t ).....	55
3.6.1.2	Uji Signifikansi Secara Simultan ( Uji F ).....	56
3.6.1.3	Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	56
3.7	Uji Asumsi Klasik.....	57
3.7.1	Uji Normalitas.....	57
3.7.2	Autokorelasi .....	58
3.7.3	Heteroskedastisitas.....	60
3.7.4	Multikolinearitas .....	61

<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>62</b>
4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian .....	62
4.1.1 Kondisi Geografis .....	62
4.1.2 Penduduk.....	63
4.1.3 Sosial .....	64
4.1.4 Pertanian.....	65
4.1.5 Industri .....	66
4.1.6 Keuangan Daerah.....	66
4.1.7 Ekonomi.....	67
4.2 Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	68
4.2.1 Sejarah Koperasi Wanita Kabupaten Ngawi.....	68
4.2.2 Prestasi Koperasi Wanita Kabupaten Ngawi .....	73
4.2.3 Program Gubernur Soekarno untuk menjadikan Jawa Timur sebagai Provinsi Koperasi.....	74
4.3 Analisis Deskripsi Sampel .....	75
4.3.1 Pengurus.....	76
4.3.2 Simpanan Anggota.....	77
4.3.3 Sisa Hasil Usaha.....	78
4.4 Estimasi Model Analisis .....	79
4.4.1 Regresi Faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha .....	80
4.4.1.1 Uji Statistik .....	81
4.4.1.2 Uji Asumsi Klasik .....	86

4.5 Pembahasan .....	92
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>97</b>
5.1 Kesimpulan .....	97
5.2 Saran .....	98

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

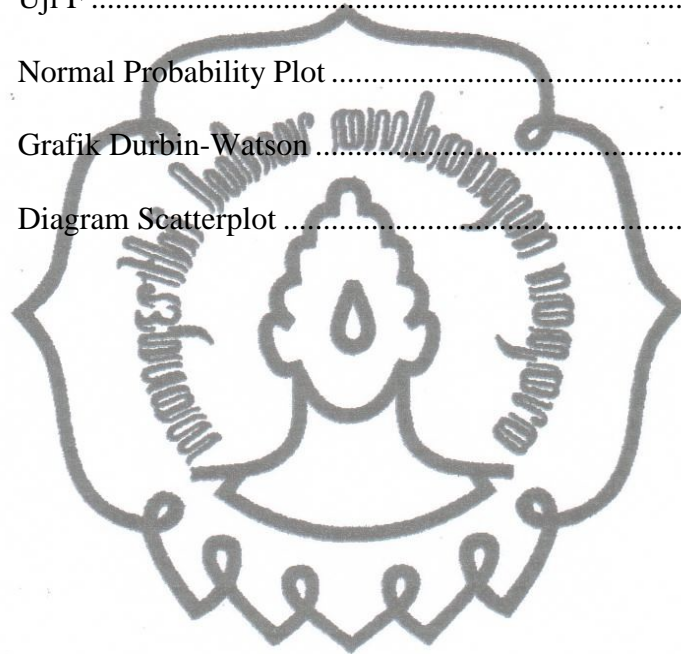
TABEL	Halaman
Tabel 1.1	5
Perkembangan Jumlah Koperasi Kabupaten Ngawi Tahun 2006 – 2010.....	
Tabel 1.2	6
Perkembangan Koperasi Wanita Kabupaten Ngawi Penerima Dana Hibah Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009....	
Tabel 3.1	48
Penentuan Jumlah Sampel Dari Populasi Tertentu Dengan Taraf Kesalahan 1%, 5% dan 10% .....	
Tabel 3.1	49
Penentuan Jumlah Sampel.....	
Tabel 4.1	76
Tingkat Pendidikan Formal Pengurus Koperasi Wanita Sampel.....	
Tabel 4.2	78
Jumlah Simpanan Anggota Koperasi Wanita Sampel Pada Akhir Tahun 2010 .....	
Tabel 4.3	76
Jumlah Sisa Hasil Usaha Koperasi Wanita Sampel Pada Akhir Tahun 2010 .....	
Tabel 4.4	80
Hasil Regresi Y .....	
Tabel 4.5	82
Hasil Uji t.....	
Tabel 4.6	84
Hasil Uji F.....	
Tabel 4.7	85
Nilai Koefisien Determinasi $R^2$ .....	
Tabel 4.8	86
Hasil Uji Normalitas .....	
Tabel 4.9	88
Uji Durbin-Watson.....	
Tabel 4.10	91
Uji Glejser .....	

Tabel 4.11 Nilai VIF dan Tolerance .....



### DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Gambar Kerangka Konseptual Penelitian.....	45
Gambar 3.1	Gambar Uji Durbin-Watson.....	58
Gambar 4.1	Uji t .....	82
Gambar 4.2	Uji F .....	84
Gambar 4.3	Normal Probability Plot .....	87
Gambar 4.4	Grafik Durbin-Watson .....	89
Gambar 4.5	Diagram Scatterplot .....	90



**ABSTRAK****ANALISIS PENGARUH PARTISIPASI ANGGOTA,  
KUALITAS PENGURUS, DAN PERANAN PEMERINTAH  
TERHADAP SISA HASIL USAHA KOPERASI WANITA  
DI KABUPATEN NGAWI  
(Study Kasus Koperasi Wanita Penerima Dana Hibah  
dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009)****Oleh :****Sri Wiyanti**

Keberadaan dan keberhasilan koperasi wanita tidak dapat dilepaskan dari konsep kepercayaan (*trust*) dari anggota kepada pengurus dan sebaliknya. Pengurus diharapkan selalu aktif dan terus meningkatkan kualitasnya dalam memperhatikan dan memahami situasi, memberikan informasi dan mendorong anggotanya untuk menjalankan usahanya dengan baik. Pemerintah Daerah sebagai pembina koperasi harus memberi dukungan berupa pembinaan yang terus menerus dan berkesinambungan agar Koperasi Wanita dapat berkembang dengan baik. Untuk itu hubungan antara anggota, pengurus dan pemerintah harus terjalin dengan baik.

Tujuan Penelitian ini meneliti pengaruh partisipasi anggota, kualitas pengurus dan peranan pemerintah terhadap sisa hasil usaha koperasi wanita Kabupaten Ngawi.

Metode penelitian ini menggunakan sampel dengan teknik *cluster proportional sampling* dengan membagikan kuesioner pada para anggota dan pengurus koperasi wanita sampel. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linier berganda.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor partisipasi anggota, kualitas pengurus dan peranan pemerintah terhadap sisa hasil usaha. Setiap peningkatan partisipasi anggota, kualitas pengurus dan peranan pemerintah akan menyebabkan peningkatan sisa hasil usaha Koperasi Wanita Kabupaten Ngawi. Ketiga variabel bebas (partisipasi anggota, kualitas pengurus dan peranan pemerintah) baik secara bersama-sama maupun secara individu berpengaruh terhadap variabel terikat (sisa hasil usaha). Diantara variabel yang diteliti, variabel partisipasi anggota lebih berpengaruh terhadap sisa hasil usaha Koperasi Wanita Kabupaten Ngawi dibandingkan variabel peranan pemerintah dan kualitas pengurus.

**Kata Kunci :** *koperasi wanita, partisipasi anggota, kualitas pengurus, peranan pemerintah, sisa hasil usaha*



**ABSTRACT****THE ANALYSIS OF  
THE MEMBERS' PARTICIPATION, THE MANAGERS' QUALITY AND  
THE ROLE OF GOVERNMENT INFLUENCE TO  
THE WOMEN'S COOPERATIVE PROFITS  
IN NGAWI REGENCY****(A Case Study Of The Women's Cooperative As A grant Recipients  
From The East Java Province Government in 2009)****By:  
Sri Wiyanti**

The Existence and the success of the Women Cooperative cannot be separated from the trust of the members to the managers and the other around. The Managers are expected to be active and always increase their qualities in notifying and understanding the situation, giving information and encouraging the members to run the bussiness well. The local government as the advisor must gives supports such as a continues development so that The Women Cooperative will develop well. Therefore, the relationship among the members, the managers and the government must well tied.

The Purpose of the study is to examine the members' participation, the managers' quality and the role of the government influence to The Women's Cooperative Profits in Ngawi Regency.

The method of the study is using samples by a cluster proportional sampling by giving questionairres to the members and the managers. The analysis technique used in this study is a multiple regression analysis.

It can be concluded from the result of the study that there is a significant influence from the members' participation, the managers' quality and the role of the government to the women's cooperative profits. If there is an enhancement of the members' participation, the managers' quality and the role of the government will increase the Women's Cooperative profit in Ngawi Regency. These independent variabels (the members' participation, the managers' quality and the role of the government) influence together and individually to the dependent variabels (Profits). Among the variabels studied, the members' participation influences more to the Woman's Cooperative profit in Ngawi Regency than the managers' quality and the role of the government.

Key words: The Women's Cooperative, The Members' Participation, The Managers' Quality, The Role of The Government, Profits.



**ABSTRAK****ANALISIS PENGARUH PARTISIPASI ANGGOTA,  
KUALITAS PENGURUS, DAN PERANAN PEMERINTAH  
TERHADAP SISA HASIL USAHA KOPERASI WANITA  
DI KABUPATEN NGAWI  
(Study Kasus Koperasi Wanita Penerima Dana Hibah  
dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009)****Oleh :****Sri Wiyanti**

Keberadaan dan keberhasilan koperasi wanita tidak dapat dilepaskan dari konsep kepercayaan (*trust*) dari anggota kepada pengurus dan sebaliknya. Pengurus diharapkan selalu aktif dan terus meningkatkan kualitasnya dalam memperhatikan dan memahami situasi, memberikan informasi dan mendorong anggotanya untuk menjalankan usahanya dengan baik. Pemerintah Daerah sebagai pembina koperasi harus memberi dukungan berupa pembinaan yang terus menerus dan berkesinambungan agar Koperasi Wanita dapat berkembang dengan baik. Untuk itu hubungan antara anggota, pengurus dan pemerintah harus terjalin dengan baik.

Tujuan Penelitian ini meneliti pengaruh partisipasi anggota, kualitas pengurus dan peranan pemerintah terhadap sisa hasil usaha koperasi wanita Kabupaten Ngawi.

Metode penelitian ini menggunakan sampel dengan teknik *cluster proportional sampling* dengan membagikan kuesioner pada para anggota dan pengurus koperasi wanita sampel. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linier berganda.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor partisipasi anggota, kualitas pengurus dan peranan pemerintah terhadap sisa hasil usaha. Setiap peningkatan partisipasi anggota, kualitas pengurus dan peranan pemerintah akan menyebabkan peningkatan sisa hasil usaha Koperasi Wanita Kabupaten Ngawi. Ketiga variabel bebas (partisipasi anggota, kualitas pengurus dan peranan pemerintah) baik secara bersama-sama maupun secara individu berpengaruh terhadap variabel terikat (sisa hasil usaha). Diantara variabel yang diteliti, variabel partisipasi anggota lebih berpengaruh terhadap sisa hasil usaha Koperasi Wanita Kabupaten Ngawi dibandingkan variabel peranan pemerintah dan kualitas pengurus.

**Kata Kunci :** *koperasi wanita, partisipasi anggota, kualitas pengurus, peranan pemerintah, sisa hasil usaha*

**ABSTRACT****THE ANALYSIS OF  
THE MEMBERS' PARTICIPATION, THE MANAGERS' QUALITY AND  
THE ROLE OF GOVERNMENT INFLUENCE TO  
THE WOMEN'S COOPERATIVE PROFITS  
IN NGAWI REGENCY****(A Case Study Of The Women's Cooperative As A grant Recipients  
From The East Java Province Government in 2009)****By:  
Sri Wiyanti**

The Existence and the success of the Women Cooperative cannot be separated from the trust of the members to the managers and the other around. The Managers are expected to be active and always increase their qualities in notifying and understanding the situation, giving information and encouraging the members to run the bussiness well. The local government as the advisor must gives supports such as a continues development so that The Women Cooperative will develop well. Therefore, the relationship among the members, the managers and the government must well tied.

The Purpose of the study is to examine the members' participation, the managers' quality and the role of the government influence to The Women's Cooperative Profits in Ngawi Regency.

The method of the study is using samples by a cluster proportional sampling by giving questionairres to the members and the managers. The analysis technique used in this study is a multiple regression analysis.

It can be concluded from the result of the study that there is a significant influence from the members' participation, the managers' quality and the role of the government to the women's cooperative profits. If there is an enhancement of the members' participation, the managers' quality and the role of the government will increase the Women's Cooperative profit in Ngawi Regency. These independent variabels (the members' participation, the managers' quality and the role of the government) influence together and individually to the dependent variabels (Profits). Among the variabels studied, the members' participation influences more to the Woman's Cooperative profit in Ngawi Regency than the managers' quality and the role of the government.

Key words: The Women's Cooperative, The Members' Participation, The Managers' Quality, The Role of The Government, Profits.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Tujuan Pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 . Diharapkan kemakmuran dan kesejahteraan dapat merata dan dinikmati oleh segenap rakyat Indonesia.

Pemerintah telah meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi sesuai dengan amanat pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, sehingga diharapkan ketiga pelaku ekonomi di Indonesia yaitu : Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta dan Koperasi dapat bekerjasama untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Koperasi merupakan salah satu soko guru perekonomian nasional, untuk itu harus terus dikembangkan.

Kaum perempuan merupakan salah satu segmen penduduk dalam pembangunan, yang memiliki jumlah seimbang dengan jumlah laki-laki. Hal tersebut merupakan potensi besar yang dimiliki perempuan untuk meningkatkan kualitas sumber dayanya sejajar dengan laki-laki.

Kenyataannya proporsi kaum perempuan yang aktif masih tertinggal dibanding laki-laki terutama dalam tingkat pengambil keputusan dan

partisipasi perempuan di bidang ekonomi. Di sisi lain, ketika perempuan memiliki kepercayaan diri dan mampu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, hal ini akan berpengaruh pada hidup perempuan, baik dalam rumah tangga maupun dalam komunitas. Perempuan sebagai pemain sentral dalam menjamin kesejahteraan keluarga, sepatutnya diberikan kesempatan ekonomi untuk menjamin ketahanan dasar keluarga melalui peningkatan akses termasuk akses terhadap sumberdaya ekonomi.

Peningkatan ekonomi keluarga melalui peran perempuan dapat tercipta manakala perempuan mau berusaha. Berbagai permasalahan yang dihadapi antara lain akses untuk memperoleh pendanaan/modal kerja/ kredit, sulitnya pendaftaran usaha, biaya, kurangnya jaminan keuangan, terbatasnya ruang gerak, teknologi, informasi pasar, serta sumber daya perempuan, dapat dicarikan solusinya ketika perempuan berkelompok bersama sesama kaumnya. Salah satu pilihan usaha tersebut adalah melalui Koperasi Wanita.

Koperasi wanita yang beranggotakan wanita, pada umumnya memiliki kegiatan yang diorientasikan kepada pemenuhan kebutuhan dan pemecahan persoalan wanita baik yang bersifat konsumtif, produktif maupun kesehatan reproduksi. Keberadaan Koperasi Wanita sangat menarik untuk dikaji karena terdapat beberapa Koperasi Wanita yang cukup berkembang seperti dua Koperasi Wanita yang ada di Pulau Jawa yaitu : (1) Koperasi Setia Bhakti Wanita (KSBW) di Surabaya. Faktor keberhasilannya ditentukan antara lain oleh sistem tanggung renteng dalam pengelolaan dana bergulir. Keberhasilan yang dicapai

tersebut telah mendorong Kementerian Negara Koperasi dan UKM mereplikasikan sistem tanggung renteng kepada 30 kelompok di 30 provinsi di Indonesia dengan menyediakan dana bergulir sebesar Rp. 225 juta atau Rp. 7,5 juta per kelompok. (2) Koperasi Wanita Kartika Chandra Pandaan (KCP) yang dinilai sehat dari segi pengelolaan dan besarnya omset. Indikator keberhasilannya dapat dilihat melalui kepemilikan supermarket, kenaikan simpan pinjam, kepemilikan pertokoan, persewaan dan sebagainya yang dicapai antara tahun 2003 – 2004 lalu. Dari konteks kasus ini diketahui bahwa wanita memiliki keunggulan khususnya keuletan, kejujuran dan ketelitian dalam pengelolaan koperasi.

Sebagian besar Koperasi Wanita cukup berkualitas walaupun jumlah anggota, volume usaha dan SHU tidak besar tetapi mereka secara konsisten memberikan dampak positif untuk peningkatan kesejahteraan keluarga. Keberhasilan pengelolaan Koperasi Wanita tidak saja menguntungkan Koperasi Wanita yang bersangkutan, tetapi juga anggota dan keluarganya serta komunitas dimana Koperasi Wanita tersebut berdiri. Karenanya, secara lebih khusus peranan wanita dalam koperasi perlu didorong dengan beberapa alasan berkaitan dengan: (1) peranan wanita dalam peningkatan kesejahteraan diri dan keluarganya. Dengan kata lain terdapat peranan yang besar wanita dalam pengentasan kemiskinan (2). Kebutuhan wanita untuk memberdayakan diri (aktualisasi diri) agar dapat berperan lebih besar di luar posisinya sebagai ibu rumah tangga.

Berkaitan dengan pemberdayaan dan peningkatan peranan wanita

dalam koperasi, Pemerintah khususnya Kementerian Negara Koperasi dan UKM sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang telah melaksanakan berbagai program. Salah satunya adalah Program Peningkatan Peran Perempuan melalui Koperasi dan UKM. Program lainnya adalah pada tahun 2004/2005 pemerintah telah melaksanakan Program Rintisan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil yang Responsif Gender melalui pengaliran dana perkuatan modal usaha kepada kelompok usaha mikro dan kecil khususnya wanita yang memiliki usaha produktif seperti KSP/USP dengan pola tanggung renteng.

Perekonomian Jawa Timur lebih banyak ditopang dari sektor UMKM. PDRB Jawa Timur Tahun 2009 sebesar Rp 687 triliun, diketahui sebanyak Rp 362 triliun atau sekitar 53,04 persen berasal dari UMKM. Sekitar 1,9 persen lainnya dari sektor koperasi. (<http://kominfo.jatimprov.go.id/>)

Perkembangan jumlah Koperasi Wanita di Kabupaten Ngawi dalam kurun waktu tahun 2006 sampai dengan 2010 amatlah pesat. Perbandingan perkembangan jumlah Koperasi Wanita jika dibandingkan dengan jumlah koperasi lainnya di Kabupaten Ngawi terlihat pada Tabel 1.1.



Tabel 1.1  
Perkembangan Jumlah Koperasi Kabupaten Ngawi  
Tahun 2006 – 2010

NO	JENIS KOPERASI	TAHUN 2006	TAHUN 2007	TAHUN 2008	TAHUN 2009	TAHUN 2010
1.	KUD	30	30	30	30	30
2.	KOPONTREN	12	13	13	13	14
3.	KOPINKRA	8	8	8	8	9
4.	KOPTI	1	1	1	1	1
5.	VETERAN	65	66	66	67	67
6.	KOPKAR	19	20	21	21	21
7.	KOP. ANGKT. DARAT	2	2	2	2	2
8.	KOP. KEPOLISIAN	1	1	1	1	1
9.	KSU	35	43	52	57	62
10.	KOPPAS	8	8	8	7	7
11.	KOP. SIMPAN PINJAM	28	30	30	34	40
12.	KOP. ANGKUTAN	1	1	1	1	1
13.	KOP. WANITA	5	6	8	104	226
14.	KOP. VETERAN	1	1	1	1	1
15.	KOP. WREDATAMA	8	8	8	8	8
16.	KOP. PEPABRI	1	1	1	1	1
17.	KOP. PEMUDA	3	3	3	3	3
18.	KOP. PK 5	3	3	3	3	3
19.	KOP. LAINNYA	141	146	153	153	153
20.	KOP. SEKUNDER	1	1	1	1	1
	JUMLAH	373	392	411	516	651

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian Kabupaten Ngawi

Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro dengan Kebijakan *Pro Gender* sebagai salah satu strategi *People Centered Development dan Participatory Based Development* yang diimplementasikan Tahun 2009-2014 melalui Pendirian Koperasi Wanita di setiap desa/kelurahan di Provinsi Jawa Timur sejumlah 4.250 Koperasi Wanita. Pada tahun 2009 telah dialokasikan dana untuk pendirian 3.750 Koperasi Wanita yang dilakukan melalui 2 tahap, dimana masing-masing akan mendapatkan bantuan permodalan sebesar Rp 25 juta.

Kabupaten Ngawi telah mendukung Program Pendirian Koperasi Wanita di setiap desa/kelurahan di Provinsi Jawa Timur dengan

membentuk 96 Koperasi Wanita yang didirikan mulai tanggal 14 September 2009 sampai dengan 23 Desember 2009. Semua Koperasi Wanita tersebut akan menerima Dana Hibah Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 25 juta rupiah. Adapun Perkembangan Koperasi Wanita Kabupaten Ngawi Penerima Dana Hibah Pemberdayaan Keuangan Mikro dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2  
Perkembangan Koperasi Wanita Kabupaten Ngawi Penerima Dana Hibah  
Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur Tahun 2009

URAIAN	TAHUN 2010									
	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
JUMLAH ANGGOTA	3.789	3.870	4.224	4.537	4.465	4.751	4.798	5.034	5.058	5.149
Pertumbuhan		2,14	9,15	7,41	(1,59)	6,41	0,99	4,92	0,48	1,80
JUMLAH MODAL SENDIRI (000)	2.585.625,5	2.602.804,0	2.615.174,5	2.639.513,0	2.636.629,3	2.665.106,0	2.671.986,0	2.692.808,0	2.694.082,0	2.704.083,0
Pertumbuhan		0,66	0,48	0,93	(0,11)	1,08	0,26	0,78	0,05	0,37
JUMLAH MODAL LUAR (000)	16.923,0	8.345,0	27.507,0	31.637,0	47.328,1	35.915,5	40.328,6	44.712,5	48.409,1	54.635,6
Pertumbuhan		(50,69)	229,62	15,01	49,60	(24,11)	12,29	10,87	8,27	12,86
JUMLAH SHU (000)	(100.999,0)	(112.417,9)	(18.517,8)	17.415,0	40.997,3	124.768,4	155.154,2	272.257,9	293.554,6	345.757,9
Pertumbuhan		(11,31)	83,53	194,04	135,41	204,33	24,35	75,48	7,82	17,78

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian Kabupaten Ngawi

Dari data diatas dapat dilihat bahwa di bulan April 2010 Sisa Hasil Usaha yang berhasil dikumpulkan masih minus Rp. 112.417.900,- atau -11,31% dari bulan Maret 2010, walaupun terjadi kenaikan jumlah anggota sebanyak 81 orang atau 2,14% dan pertambahan modal sendiri sebesar Rp. 7.178.500,- atau 0,66%. Hal ini dikarenakan belum seimbangnya pendapatan dan pengeluaran yang ada. Di bulan Juli 2010 terjadi penurunan jumlah anggota sebanyak 72 orang atau -1,59% dari bulan sebelumnya dan juga diikuti

penurunan Modal Sendiri sebesar Rp. 2.883.700,- atau -0,11% tetapi Sisa Hasil Usaha terus bertambah sebesar Rp. 23.582.310,- atau 135,41%. Sisa Hasil Usaha yang berhasil dikumpulkan dari bulan ke bulan di tahun 2010 terus meningkat dan terjadi kenaikan yang cukup drastis di bulan Agustus 2010 dengan angka pertumbuhan mencapai 204,33%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah modal sendiri yang merupakan modal dari anggota sangat tergantung dari partisipasi anggota koperasi, akan tetapi tidak selalu seiring dengan pertambahan jumlah Sisa Hasil Usaha. Dimungkinkan bahwa pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus sangat berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi anggota dalam hal menambah ataupun mengurangi modal sendiri dan juga naik turunnya Sisa Hasil Usaha yang dapat dikumpulkan dari bulan ke bulan di tahun berkenaan.

Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Anggota koperasi dituntut kesadarannya untuk aktif dalam memenuhi hak dan kewajibannya karena sangat diperlukan untuk pengembangan koperasi. Kesadaran yang tinggi anggota itu dimanifestasikan

dalam bentuk adanya partisipasi aktif anggota koperasi sehingga diharapkan usaha yang dilaksanakan akan mendatangkan laba usaha.

Keberadaan dan keberhasilan koperasi wanita tidak dapat dilepaskan dari konsep kepercayaan (*trust*) dari anggota kepada Pengurus dan sebaliknya. Kepercayaan antara koperasi dengan anggotanya terbangun jika kedua belah pihak saling memenuhi kewajiban dan hak masing-masing. Anggota akan percaya kepada koperasi jika koperasi mampu memenuhi kebutuhan anggotanya melalui mekanisme prinsip-prinsip perkoperasian yang menjadi kesepakatan. Sebaliknya koperasi ada, bertahan dan berkembang jika anggotanya memenuhi kewajiban-kewajibannya. Pengurus diharapkan selalu aktif dan terus meningkatkan kualitasnya dalam memperhatikan dan memahami situasi, memberikan informasi dan mendorong anggotanya untuk menjalankan usahanya dengan baik. Pemerintah Daerah sebagai pembina koperasi harus memberi dukungan berupa pembinaan yang terus menerus dan berkesinambungan agar Koperasi Wanita dapat berkembang dengan baik.

Dari fenomena tersebut, dalam penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Sisa Hasil Usaha Koperasi Wanita di Kabupaten Ngawi. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan judul : **Analisis Pengaruh Partisipasi Anggota, Kualitas Pengurus, dan Peranan Pemerintah Terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Wanita Di Kabupaten Ngawi.** (Studi Kasus Koperasi Wanita Penerima Dana Hibah

Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009).

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaruh partisipasi anggota, kualitas pengurus dan peranan pemerintah secara parsial terhadap sisa hasil usaha Koperasi Wanita di Kabupaten Ngawi ?
2. Bagaimanakah pengaruh antara partisipasi anggota, kualitas pengurus dan peranan pemerintah secara serempak terhadap sisa hasil usaha Koperasi Wanita di Kabupaten Ngawi ?

## 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan penelitian, maka tujuan studi yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggota, kualitas pengurus dan peranan pemerintah secara parsial terhadap sisa hasil usaha Koperasi Wanita di Kabupaten Ngawi .
2. Untuk mengetahui pengaruh antara partisipasi anggota, kualitas pengurus dan peranan pemerintah secara serempak terhadap sisa hasil usaha Koperasi Wanita di Kabupaten Ngawi .

#### 1.4 MANFAAT PENELITIAN

##### 1. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang hubungannya dengan upaya menggerakkan perekonomian masyarakat melalui gerakan perkoperasian, terutama pengembangan Koperasi Wanita di Kabupaten Ngawi.

##### 2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan dan dapat memperkaya wacana sebagai bahan referensi kajian ilmu pengetahuan dibidang manajemen ekonomi pembangunan.

##### 3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai implementasi teori manajemen ekonomi pembangunan dalam penerapannya dan pengembangan perkoperasian di lapangan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Teoritis

##### 2.1.1 Tinjauan Koperasi Secara Umum

###### 2.1.1.1 Pengertian koperasi

Istilah koperasi (*cooperative*) berasal dari kata *co-operation* yang artinya kerjasama. Banyak para ahli mengartikan koperasi berbeda-beda, tetapi pada umumnya koperasi dikenal sebagai suatu bentuk badan usaha yang berbeda dengan perusahaan lainnya seperti CV, Firma, PT, BUMN, dan badan usaha lainnya.

Berikut ini beberapa pengertian koperasi dari beberapa ahli dan organisasi:

a) Dalam ILO *recommendation* Nomor 127 pasal 12 (1)

“Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang berkumpul secara sukarela untuk berusaha bersama mencapai tujuan bersama melalui organisasi yang dikontrol secara demokratis, bersama-sama berkontribusi sejumlah uang dalam membentuk modal yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama tersebut dan bersedia turut bertanggung jawab menanggung resiko dari kegiatan tersebut, turut menikmati manfaat usaha bersama tersebut, sesuai dengan kontribusi permodalan yang diberikan orang-orang tersebut, kemudian orang-orang tersebut secara bersama-sama dan langsung turut memanfaatkan organisasi tadi.”

b) Menurut *International Cooperative Alliance* (ICA)

“Koperasi adalah perkumpulan dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama, melalui perusahaan yang mereka milik bersama dan mereka kendalikan secara demokratis.”

c) Menurut Sagimun (1994 : 14) mengemukakan bahwa :

”Koperasi adalah suatu badan hukum dengan jalan bekerja sama atas dasar sukarela menyelenggarakan suatu pekerjaan untuk memperbaiki kehidupan anggota-anggotanya.”

d) Menurut Widiyanti dan Sunindia (1998 : 21) mengemukakan bahwa:

“Koperasi merupakan kumpulan orang-arang yang bekerja sama memenuhi satu atau lebih kebutuhan ekonomi atau bekerja sama melakukan usaha, maka dapat dibedakan dengan jelas dari badan usaha atau pelaku ekonomi lainnya yang lebih mengutamakan modal. Dengan demikian, koperasi sebagai badan usaha mengutamakan faktor manusia dan bekerja atas dasar perikemanusiaan bagi kesejahteraan para anggotanya.”

e) Menurut Anoraga, (1995 : 17) mengemukakan bahwa :

”Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk keluar sebagai anggota dan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.”

f) Menurut Undang-undang nomor 25 Tahun 1992

”Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Pengertian koperasi berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Terdapat dua unsur yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Koperasi sebagai suatu bentuk perusahaan berusaha memperjuangkan pemenuhan kebutuhan



ekonomi anggotanya secara efisien, dan sebagai perkumpulan orang koperasi memiliki watak sosial dan keuntungan bukanlah tujuan utamanya.

### 2.1.1.2 Fungsi dan Peran Koperasi

Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 4 menjelaskan mengenai fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

- a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya.
- d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- e) Mengembangkan kreativitas dan membangun jiwa berorganisasi bagi para pelajar bangsa.

### 2.1.1.3 Jenis – jenis Koperasi

Baswir (2000:75) menyebutkan bahwa penggolongan koperasi adalah pengelompokan koperasi ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kriteria dan karakteristiknya.

a. Berdasarkan bidang usahanya.

Bidang usaha koperasi mencerminkan jenis jasa yang ditawarkan koperasi kepada pelanggannya. Berdasarkan bidang usaha ini, koperasi dapat digolongkan kedalam beberapa kelompok sebagai berikut: Koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi pemasaran dan koperasi kredit.

b. Berdasarkan jenis komoditi.

Berdasarkan jenis komoditinya koperasi dikelompokan berdasarkan jenis barang dan jasa yang menjadi objek usahanya. Berdasarkan jenis komoditi ini koperasi dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok: koperasi pertambangan, koperasi pertanian dan peternakan, koperasi industri dan kerajinan dan koperasi jasa-jasa.

c. Berdasarkan daerah kerja.

Yang dimaksud dengan daerah kerja koperasi dalam hal ini adalah luas sempitnya wilayah yang dijangkau oleh suatu badan usaha koperasi dalam melayani kepentingan anggotanya atau melayani masyarakat. Berdasarkan daerah kerjanya koperasi dibedakan menjadi: Koperasi primer, Koperasi sekunder, Koperasi tersier.

d. Berdasarkan jenis anggota.

Koperasi di Indonesia pada umumnya berkelompok berdasarkan jenis anggotanya. Hal itu tidak hanya tampak pada penggolongan koperasi pada tingkat primer dan sekunder, tapi terutama sangat mencolok pada tingkat induk koperasi. Berdasarkan jenis anggotanya dapat dikelompokkan menjadi: koperasi karyawan (Kopkar), koperasi pedagang pasar (Koppas), Koperasi angkatan darat (Primkopad), Koperasi mahasiswa (Kopma), Koperasi pegawai republik Indonesia (KPRI), Koperasi pondok pesantren (Koppontren), Koperasi peran serta wanita (Koperwan), Koperasi pramuka (Kopram) dan lain-lain.

Koperasi yang menjadi objek penelitian adalah Koperasi Wanita Penerima Dana Hibah Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 yang ada di Kabupaten Ngawi. Koperasi Wanita ini beranggotakan wanita yang bertempat tinggal di sekitar Koperasi tersebut berdiri, dan merupakan jenis Koperasi Jasa.

#### 2.1.1.4 Perangkat Organisasi Koperasi

Alat perlengkapan organisasi koperasi menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992, terdiri dari :

a. Rapat Anggota

Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi, keputusan diambil berdasarkan demokrasi Indonesia “ musyawarah

untuk mufakat” dan apabila tidak terdapat kata sepakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan pemungutan suara dan setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Rapat anggota koperasi diadakan untuk menetapkan , antara lain :

- Anggaran dasar atau perubahan
- Menetapkan kebijakan – kebijakan umum
- Memilih/mengangkat dan memberhentikan pengurus, badan pemeriksa
- Menetapkan rencana kerja, anggaran belanja, pengesahan neraca, dan kebijakan pengurus
- Hal – hal lain yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar

b. Pengurus

Pengurus koperasi adalah anggota koperasi yang memperoleh kepercayaan dari Rapat Anggota untuk memimpin organisasi dan usaha koperasi untuk suatu periode tertentu. Syarat untuk dipilih menjadi pengurus :

- Mempunyai sifat kejujuran dan keterampilan kerja
- Syarat – syarat lain yang ditentukan dalam anggaran dasar

Ketentuan bagi pengurus buku dari anggota hanya sampai jumlah maksimum sepertiga jumlah pengurus.

Tugas pengurus koperasi:

- mengelola Koperasi dan usahanya;

- mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
- menyelenggarakan Rapat Anggota;
- mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

c. Badan Pengawas

Badan Pengawas merupakan badan yang mengawasi dan memeriksa pengurus koperasi. Keanggotaan Badan Pengawas ini dipilih dari anggota di dalam rapat anggota. Keanggotaan Badan Pengawas tidak dapat dirangkap dengan jabatan pengurus untuk memisahkan secara tegas antara tugas pengawas sebagai badan kontrol dengan pengurus.

Tugas dari Badan Pengawas koperasi ialah:

1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
2. membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawas harus dirahasiakan terhadap pihak ketiga, sedangkan Badan Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota.

### 2.1.2. Partisipasi Anggota Koperasi

Istilah partisipasi secara harfiah berasal dari bahasa asing, yaitu *participation*; yang artinya mengikutsertakan pihak lain, dapat juga diartikan sebagai keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu kegiatan. Partisipasi diartikan Ropke (2003:52) suatu proses dimana sekelompok orang (anggota) menemukan dan mengimplementasikan ide-ide/gagasan koperasi. Pengertian tersebut lebih mengarahkan partisipasi pada suatu proses keikutsertaan anggota dalam pengambilan keputusan dalam koperasi.

Partisipasi dilihat dari segi dimensinya menurut Hendar dan Kusnadi (1999:61), terdiri dari :

- a. Partisipasi dipaksakan (*forced*) dan partisipasi sukarela (*voluntary*)  
Partisipasi dipaksakan terjadi karena paksaan undang-undang atau keputusan pemerintah untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pekerjaan. Sedangkan partisipasi sukarela terjadi karena kesadaran untuk ikut serta berpartisipasi.

- b. Partisipasi formal dan partisipasi informal

Partisipasi yang bersifat formal, biasanya tercipta suatu mekanisme formal dalam pengambilan keputusan. Sedangkan partisipasi yang bersifat informal, biasanya hanya terdapat persetujuan lisan antara atasan dan bawahan sehubungan dengan partisipasi.

c. Partisipasi Langsung dan partisipasi tidak langsung

Partisipasi langsung terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok persoalan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain. Sedangkan partisipasi tidak langsung terjadi apabila terdapat wakil yang membawa inspirasi orang lain yang akan berbicara atas nama karyawan atau anggota dengan kelompok yang lebih tinggi tingkatannya.

d. Partisipasi kontributif dan partisipasi insentif

Partisipasi kontributif yaitu kedudukan anggota sebagai pemilik dengan mengambil bagian dalam penetapan tujuan, pembuatan keputusan dan proses pengawasan terhadap jalannya perusahaan Koperasi. Sedangkan partisipasi insentif yaitu kedudukan anggota sebagai pelanggan/pemakai dengan memanfaatkan berbagai potensi pelayanan yang disediakan oleh perusahaan dalam menunjang kepentingannya.

Partisipasi anggota diukur dari kesediaan anggota untuk memikul kewajiban dan hak keanggotaan secara bertanggungjawab. Jika sebagian besar anggota sudah menunaikan kewajiban dan melaksanakan hak secara bertanggungjawab, maka partisipasi anggota koperasi yang bersangkutan sudah dikatakan baik, akan tetapi jika ternyata hanya sedikit yang demikian, maka partisipasi anggota koperasi yang dimaksud dikatakan buruk atau rendah.

Partisipasi adalah kesediaan anggota untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk menjalankan dan mengembangkan lembaga koperasi. Koperasi akan berfungsi dengan baik dan berhasil jika mengikut sertakan partisipasi anggota.

Hal ini sesuai dengan pendapat Anoraga (1992:111) Partisipasi anggota merupakan kunci dari keberhasilan koperasi, sehingga peran anggota sangat penting. Anggota mempunyai wewenang mengendalikan koperasi, yaitu berperan sebagai pemilik dan sebagai pengguna jasa koperasi. Partisipasi anggota dapat diwujudkan jika anggota mengetahui hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi. Sebagaimana tertuang dalam Undang- Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab V pasal 20, setiap anggota mempunyai kewajiban :

- a) Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota;
- b) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi;
- c) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

Setiap anggota mempunyai hak :

- a) Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota;
- b) Memilih dan /atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas;
- c) Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan Anggaran Dasar;



- d) Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar Rapat Anggota diminta maupun tidak diminta;
- e) Memanfaatkan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama antara sesama anggota;
- f) Mendapatkan keterangan mengenai Sisa Hasil Usaha Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Menurut Widiyanti (2002:200) ciri-ciri anggota yang berpartisipasi baik dapat diindikasikan sebagai berikut:

- a) Melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib secara tertib dan teratur.
- b) Membantu modal koperasi disamping simpanan pokok dan wajib sesuai kemampuan masing-masing.
- c) Menjadi langganan koperasi yang setia.
- d) Menghadiri rapat-rapat dan pertemuan anggota secara aktif.
- e) Menggunakan hak untuk mengawasi jalannya usaha koperasi, mengetahui anggaran dasar dan rumah tangga, peraturan-peraturan lainnya dan keputusan bersama lainnya.

Menurut Sukamdya (1996:124) partisipasi anggota harus terwujud dalam tindakan nyata sehari-hari, misalnya berbelanja atau bertransaksi dengan koperasi dan memasyarakatkan koperasi kepada lingkungan. Partisipasi anggota dalam manajemen juga harus direalisasikan melalui berbagai cara antara lain :

- a) Menerima dan melaksanakan anggaran dasar dan keputusan rapat anggota.
- b) Memilih serta memberhentikan pengurus dan pengawas.
- c) Mengesahkan perubahan anggaran dan investasi yang penting.
- d) Mengawasi pengurus dan pengelola secara dinamis.
- e) Mengusulkan untuk memeriksa keuangan agar tidak ada penyelewengan.
- f) Membantu permodalan koperasi sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- g) Membayar simpanan- simpanan yang menjadi kewajibannya.
- h) Melakukan transaksi dan aktif dengan kegiatan koperasi.
- i) Memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan tugas pengurus.
- j) Mengikuti dan mendorong Sisa Hasil Usaha Koperasi.

Partisipasi anggota dapat diukur melalui beberapa kriteria yang ada, yaitu:

- a) Melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib secara tertib dan teratur.
- b) Membantu modal koperasi disamping simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota.
- c) Menjadi pelanggan koperasi yang setia.
- d) Menghadiri rapat- rapat dan pertemuan koperasi.

Berdasarkan keterangan diatas, partisipasi dapat digolongkan menjadi : partisipasi dalam organisasi, partisipasi dalam modal dan partisipasi dalam usaha/jasa koperasi.

Pendapat lain mengenai partisipasi dikemukakan oleh Ropke (2003:52) dengan membagi tipe-tipe partisipasi anggota menjadi :

- a) Partisipasi dalam menggerakkan atau mengkontribusikan sumberdaya.
- b) Partisipasi dalam mengambil keputusan (perencanaan, implementasi/ pelaksanaan, evaluasi).
- c) Partisipasi anggota dalam menikmati manfaat

Berdasarkan penjelasan Undang-undang nomor 25 tahun 1992, partisipasi anggota dapat dikelompokkan menjadi :

- a) Partisipasi anggota dalam rapat anggota tahunan

Rapat anggota tahunan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang diselenggarakan satu kali pada setiap tahunnya setelah tutup buku. Rapat anggota sebagai wadah bagi para anggota untuk mengemukakan pendapat baik untuk kelangsungan usaha koperasi atau hal-hal lainnya. Sehingga rapat anggota dapat juga dikatakan sebagai cara untuk mengambil keputusan dengan suara terbanyak atau secara mufakat berdasarkan anggota yang hadir.

Dijelaskan dalam Undang- Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 23, rapat anggota menetapkan:

- 1) Anggaran dasar.

- 2) Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi.
  - 3) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas
  - 4) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
  - 5) Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
  - 6) Pembagian sisa hasil usaha
  - 7) Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.
  - 8) Partisipasi anggota dalam permodalan koperasi.
- b) Partisipasi anggota dalam penanaman modal melalui berbagai macam simpanan

Sumber permodalan koperasi menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 pasal 41, meliputi :

- 1) Modal sendiri, terdiri dari :
  - a) Simpanan pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

b) Simpanan wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu tertentu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

c) Dana cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah dana yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

d) Hibah

Hibah adalah pemberian yang diterima koperasi dari pihak lain, berupa uang atau barang. Hibah muncul sebagai komponen modal sendiri disebabkan karena pengalaman banyak koperasi menerima hibah, terutama dari pemerintah. Maksud ketentuan hibah dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 adalah agar koperasi dapat memeliharanya dengan baik dan dicatat dalam neraca pos modal sendiri. Koperasi yang menerima hibah harta tetap seperti peralatan atau mesin diwajibkan melakukan penyusutan, sehingga pada saatnya koperasi dapat membeli yang baru.

## 2) Modal pinjaman

Modal pinjaman yang digunakan oleh koperasi adalah modal yang berasal dari :

### a) Anggota ;

Pinjaman ini diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.

### b) Koperasi lainnya dan/atau anggotanya ;

### c) Bank dan lembaga keuangan lainnya ;

Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

### d) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya ;

### e) Sumber lain yang sah.

## 3) Modal penyertaan

Menurut penjelasan pasal 42 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, modal penyertaan dapat bersumber dari pemerintah maupun masyarakat, dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi terutama yang berbentuk investasi. Modal penyertaan ikut menanggung resiko. Pemilik modal penyertaan tidak mempunyai suara dalam rapat anggota dan dalam menentukan kebijakan secara keseluruhan. Namun demikian, pemilik modal penyertaan dapat ikut serta dalam pengelolaan dan pengawasn usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaanya sesuai dengan perjanjian.

- c) Partisipasi anggota dalam memanfaatkan pelayanan yang disediakan oleh Koperasi

Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk anggota. Pelayanan merupakan usaha yang dilakukan koperasi sebagai wujud perhatian dan kepedulian kepada para anggotanya dengan mengusahakan berbagai macam kegiatan yang sesuai dengan kepentingan para anggotanya. Oleh karena itu pengurus maupun pengelola koperasi harus memberikan motivasi kepada anggota untuk berpartisipasi dalam memanfaatkan pelayanan yang disediakan.

Beberapa alasan mengapa individu menjadi anggota koperasi dan memanfaatkan pelayanan koperasi menurut Ropke ( 2003: 40) yaitu:

- 1) Koperasi harus memiliki keunggulan kompetitif yang potensial dibandingkan dengan lembaga lembaga lainnya (*market test*).
- 2) Koperasi harus mengimplementasikan atau mewujudkan keunggulan bagi kepentingan para anggotanya. (*participation test*).

Berdasarkan prinsip identitas ganda anggota koperasi yaitu sebagai pemilik dan sekaligus pelanggan , maka koperasi dalam memberikan pelayanan kepada anggota harus memuaskan.

### 2.1.3 Kualitas Pengurus

Pengelola (pengurus) dalam organisasi koperasi memiliki fungsi yang amat strategis yaitu bertindak sebagai pengusaha yang menjaga kesinambungan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang efisien. Rendahnya kualitas dari pengurus koperasi disebabkan oleh berbagai faktor antara lain rendahnya kemampuannya sebagai seorang wirausaha dalam mengelola koperasi yang mengakibatkan proses manajemen koperasi lemah sehingga arah dan tujuan yang hendak dicapai koperasi tidak bisa diraih terutama dalam peningkatan perkembangan usahanya. Partadiredja (1995:9) mengungkapkan bahwa “Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu Koperasi adalah Manajemen”. Berhasil tidaknya koperasi sangat tergantung pada kemampuan manajemen yang dilaksanakan oleh pengurus ataupun oleh manajer. Di era persaingan global yang semakin ketat, eksistensi individu, masyarakat ataupun organisasi akan ditentukan oleh keunggulan daya saing yang berkesinambungan. Suatu masyarakat atau organisasi termasuk Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dapat mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada bila memiliki sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan mempunyai daya saing tinggi.

Sumarsono (2003:60) menyatakan bahwa terdapat tiga syarat yang harus dimiliki oleh seorang pengelola (manajer/pengurus) , yaitu : *Managerial skill, Technical skill dan Entrepreneur skill*. Selain dari *managerial skill* dan *technical skill*, *entrepreneur skill* merupakan salah

*commit to user*



satu keahlian yang penting dan harus dimiliki oleh pengurus dalam menjalankan usaha koperasi. Keahlian kewirausahaan merupakan salah satu keahlian yang sangat menunjang dalam proses pengembangan suatu unit usaha, karena tanpa jiwa wirausaha yang baik maka perkembangan usaha akan rendah.

Seorang wirausaha memerlukan pengetahuan untuk bisa berusaha bertahan dan berkembang dalam perekonomian modern, seperti pengetahuan mengenai permodalan, pemasaran, manajemen usaha, teknologi, dan informasi. Wirausaha koperasi harus mengenal dan menghayati 5 asas pokok kewirausahaan yang terdiri dari :

- 1) Kemauan yang kuat untuk berkarya dengan semangat kemandirian.
- 2) Kemauan dan kemampuan memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis termasuk keberanian mengambil risiko usaha.
- 3) Kemampuan berfikir dan bertindak kreatif dan inovatif.
- 4) Kemampuan bekerja secara teliti, tekun, dan produktif.
- 5) Kemauan dan kemampuan untuk berkarya dalam kebersamaan berlandaskan etika bisnis yang sehat.

Kelima asas di atas dapat menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pengelola koperasi baik itu pengurus ataupun manajer.

Program pemasyarakatan kewirausahaan telah dilakukan oleh pemerintah dalam langkah-langkah pembinaan dan pengembangan sumber

daya manusia dan sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Republik Indonesia Tahun 1995 Tentang Usaha Skala Kecil yang terdiri dari :

- 1) memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan,
- 2) meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial,
- 3) membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan, konsultasi usaha kecil
- 4) menyediakan tenaga penyuluhan dan konsultasi usaha kecil.

Seorang wirausaha koperasi harus memiliki kemampuan dalam menemukan dan mengevaluasi peluang-peluang, mengumpulkan sumber-sumber daya yang diperlukan dan bertindak untuk memperoleh keuntungan dan peluang-peluang itu. Pengurus atau manajer sebagai pengelola koperasi yang berjiwa wirausaha haruslah menunjukkan sifat kepemimpinannya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perkoperasian.

Pengelola koperasi baik itu pengurus ataupun manajer sebaiknya memiliki sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh seorang wirausaha seperti yang diungkapkan oleh Marbun dalam Alma (2004:39) adalah sebagai berikut ;

- 1) Percaya diri
- 2) Berorientasikan tugas dan hasil
- 3) Pengambil resiko
- 4) Kepemimpinan
- 5) Keorisinilan
- 6) Berorientasi ke masa depan.

Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh pengelola koperasi baik itu pengurus ataupun manajer yaitu tentang kemampuan menjadi seorang wirausaha koperasi yang handal yaitu dengan memiliki sifat –sifat wirausaha yang disikapi dengan baik dan benar. Kondisi tersebut akan membawa khususnya anggota koperasi dan umumnya seluruh rakyat Indonesia ke puncak keberhasilan, hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ropke dalam Tiktik (2004:69) yang mengatakan : “Suatu bangsa akan berkembang lebih cepat apabila ia mempercepat kelompok wirausahanya, memperluas lingkup kemerdekaan ekonomi yang memungkinkan tingkah laku wirausaha dan berhasil menciptakan suatu lingkungan sosio-ekonomi yang mendorong para wirausaha ini secara optimal”.

#### **2.1.4 Peranan Pemerintah**

Pemerintah sebagai penggerak ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional, sangat berkepentingan terhadap keberhasilan koperasi. Oleh karena itu, pemerintah berperan dalam memberikan pembinaan, perlindungan dan peluang usaha bagi koperasi yang dalam pelaksanaan harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Ketentuan-ketentuan tentang pembinaan diantaranya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pasal 60, pasal 61, pasal 62, pasal 63 dan pasal 64 BAB XII tentang pembinaan. Pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim

dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi, serta dalam ayat (2) pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi. Pemerintah memiliki landasan yang jelas dan kuat untuk melaksanakan peranannya dalam menetapkan kebijakan pembinaan yang diperlukan guna mendorong pertumbuhan, perkembangan, pemasyarakatan koperasi sesuai dengan prinsip kemandirian tanpa mencampuri urusan internal organisasi koperasi.

Pemberian bimbingan, kemudahan, dan perlindungan oleh pemerintah merupakan upaya pengembangan koperasi yang dilaksanakan melalui penetapan kebijaksanaan, penyediaan fasilitas (fasilitator), dan konsultasi yang diperlukan agar koperasi mampu melaksanakan fungsi dan perannya serta dapat mencapai tujuannya. Seluruh aparatur pemerintah, baik pusat maupun di daerah melakukan upaya dalam mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan pemasyarakatan koperasi. Pembinaan terhadap koperasi dilakukan oleh pejabat di lingkungan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu sebagai instansi pemerintah yang berkedudukan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pembinaan ini dimaksudkan agar pengelolaan koperasi dilakukan secara baik sehingga menumbuhkembangkan usaha koperasi dan kepercayaan dari pihak-pihak terkait, seperti anggota dan calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.

Pejabat di lingkungan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang melaksanakan pembinaan terhadap koperasi, mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Memantau Sisa Hasil Usaha Koperasi secara berkala melalui laporan keuangan koperasi yang bersangkutan,
- 2) Melakukan pemeriksaan secara menyeluruh baik yang menyangkut organisasi maupun usahanya, termasuk pelaksanaan program pembinaan anggota,
- 3) Melakukan penilaian kesehatan koperasi.

(Deputi Kelembagaan Koperasi & UKM, 2004:1 10)

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pasal 62 menyebutkan bahwa dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, pemerintah :

- 1) Membimbing usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya.
- 2) Mendorong, mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian.
- 3) Memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi.
- 4) Membantu pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerjasama saling menguntungkan antara koperasi.
- 5) Memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar

dan Prinsip Koperasi.

Kementerian Negara Koperasi dan UKM menggelar kegiatan gelar gerakan masyarakat sadar koperasi (Gemaskop) untuk menumbuhkan semangat berkoperasi ditengah-tengah masyarakat. Tujuan utama Gemaskop adalah untuk mengajak orang berkoperasi melalui penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang badan usaha koperasi dan membenahi kualitas koperasi untuk mendapatkan kembali jati dirinya. Program Gemaskop diluncurkan untuk menggalang kembali nilai-nilai gerakan koperasi seutuhnya agar koperasi tetap berperan sebagai soko guru perekonomian nasional. Pemerintah melalui Gemaskop berharap jika masih ada kelemahan yang terjadi dalam operasionalnya, dapat segera teratasi.

Strategi pencapaian kedua Gemaskop adalah melaksanakan sosialisasi dan pendampingan kepada koperasi untuk menerapkan nilai dan prinsip koperasi serta menyiapkan pedoman-pedoman perkoperasian yang terkait manajemen, organisasi, keanggotaan dan akuntansi. Tahapan implementasinya adalah membentuk dan memperkuat institusi pelaksanaan Gemaskop, harmonisasi peraturan perundang-undangan, diseminasi dan pendidikan serta pemantauan, evaluasi maupun pelaporan.

Kebijakan pemerintah lain yang turut meningkatkan pertumbuhan koperasi di Indonesia adalah program pemberian bantuan modal untuk Koperasi Wanita di Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur

mengalokasikan dana sebesar Rp 25 miliar untuk sekitar seribu Koperasi Wanita.

Saat ini jumlah Koperasi Wanita di Jawa Timur mencapai 8.506 unit, dan hanya sekitar seribu yang berhak mendapatkan bantuan permodalan sebesar Rp 25 juta. Koperasi Wanita yang layak mendapatkan bantuan tersebut adalah Koperasi Wanita yang telah berhasil mengembangkan modal bantuan tahun lalu sebesar Rp 25 juta dan mampu menambah jumlah anggota koperasi. Pemberian tambahan modal ini menarik karena bisa memacu Koperasi Wanita untuk lebih kreatif dalam mengembangkan usahanya di daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berusaha memastikan kebenaran data Koperasi Wanita yang telah dievaluasi dengan meninjau langsung sebelum menyalurkan bantuan. Pemberian bantuan permodalan itu sebagai upaya untuk mempersempit ruang gerak praktik rentenir di wilayah perdesaan.

Program pembentukan 8.500 Koperasi Wanita ditingkat desa di 38 Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur diawali tahun 2009 hingga akhir tahun 2010 diharapkan bisa selesai seluruhnya. Pada tahun 2011, Gubernur akan menambah sekitar 1000 Koperasi Wanita. Modal awal sebagai *stimulant* masing-masing Koperasi Wanita sebesar Rp.25 juta.

### 2.1.5 Keberhasilan Usaha

Konsep keberhasilan usaha koperasi pada dasarnya adalah suatu konsep yang bersifat relatif. Hal ini karena terdapat banyak pandangan yang berbeda terhadap pengertian, indikator maupun penyebab timbulnya. Konsep tertentu dari keberhasilan usaha tidak dapat dipakai untuk memahami berbagai masalah secara simultan, namun keberhasilan usaha suatu organisasi ekonomi pada umumnya selalu mengimplikasikan pada pendapatan yang lebih besar dari pada pengeluaran. Ropke dalam Hendar dan Kusnadi (1999:175) menyatakan bahwa secara umum faktor-faktor internal yang berpengaruh terhadap keberhasilan dan perkembangan usaha koperasi berhubungan dengan beberapa faktor yang meliputi : pengelola, pelayanan, partisipasi anggota, permodalan dan pembinaan pemerintah.

Muenker (1989) menjelaskan bahwa keberhasilan koperasi tidak hanya dapat dilihat dari neraca perusahaan koperasi saja. Karena SHU yang besar bukan satu-satunya tolok ukur yang diperlukan dalam menilai keberhasilan manajemen. Peningkatan kepentingan anggota dengan menawarkan kondisi yang lebih baik bagi para anggota bahkan lebih penting daripada pembagian SHU pada akhir tahun buku.

Keberhasilan koperasi sebagai badan usaha ekonomi yang berwatak sosial atas asas kekeluargaan adalah hasil dari seluruh proses pelaksanaan kegiatan koperasi mulai dari melaksanakan RAP, dan rapat-rapat anggota lain dalam menetapkan program, tujuan, dan pengawasan, sampai pada realisasi pelaksanaan semua program yang telah ditetapkan,



dan pelaksanaan RAT pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, yang pelaksanaannya didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi koperasi.

Keberhasilan usaha koperasi dilihat sebagai badan usaha yang bersifat sosial atas asas kekeluargaan dapat berbentuk peningkatan kualitas pelayanan koperasi dengan menawarkan kondisi yang lebih baik bagi anggotanya, yang dapat dirasakan memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan bagi para anggotanya.

Pengertian keberhasilan usaha koperasi sebagai lembaga usaha ekonomi/ badan usaha adalah keberhasilan yang selalu diimplikasikan selisih antara pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Besarnya pendapatan dibanding dengan modal, kepercayaan kemampuan pengelolaan keuangan dengan hutang dan sebagainya. Keberhasilan ini dapat dilihat melalui data kuantitatif riil, laporan bulanan, tahunan koperasi.

#### **2.1.6 Sisa Hasil Usaha Koperasi**

Ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (total revenue [TR]) dengan biaya-biaya atau biaya total (total cost [TC]) dalam satu tahun buku (Sitio dan Tambah, 2001 : 87).

Pengertian SHU menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian, Bab IX, pasal 45 adalah sebagai berikut :

- 1) SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- 2) SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- 3) Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

Dengan mengacu pada pengertian di atas, maka besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi.

Menurut Hendar dan Kusnadi (1999) menyatakan bahwa :

”Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku (Januari s/d Desember) dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Pada hakekatnya sisa hasil usaha koperasi sama dengan laba untuk perusahaan lain”.

Sisa Hasil Usaha (SHU) harus dirinci menjadi SHU yang diperoleh dari transaksi dengan para anggota dan SHU yang dari bukan anggota. Yang diperoleh dari anggota dikembalikan kepada masing-masing anggota sedangkan yang diperoleh dari pihak luar tidak boleh dibagikan kepada anggota.

Pembagian SHU dibicarakan atau diputuskan dalam rapat anggota kemudian ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi. Sebelum dibagikan kepada anggota sesuai dengan hak anggota tersebut, SHU bersumber dari:

- 1) Dari usaha atau bisnis yang diselenggarakan dengan anggota.
- 2) Dari usaha atau bisnis yang diselenggarakan dengan bukan anggota.

Dari kedua sumber tersebut, maka SHU yang dibagikan kepada anggota hanyalah SHU yang memang berasal dari usaha atau bisnis dengan anggota koperasi. Sedangkan SHU yang bersumber dari usaha yang bukan berasal dari anggota (non anggota koperasi) dimasukkan ke dalam cadangan untuk modal koperasi atau untuk keperluan lainnya.

Acuan dasar untuk membagi SHU adalah prinsip-prinsip dasar koperasi yang menyebutkan bahwa pembagian koperasi dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Untuk koperasi Indonesia, dasar hukumnya adalah Pasal 5, ayat 1; UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang dalam penjelasannya mengatakan bahwa “pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan”.

Dengan demikian, SHU koperasi yang diterima oleh anggota bersumber dari dua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu:

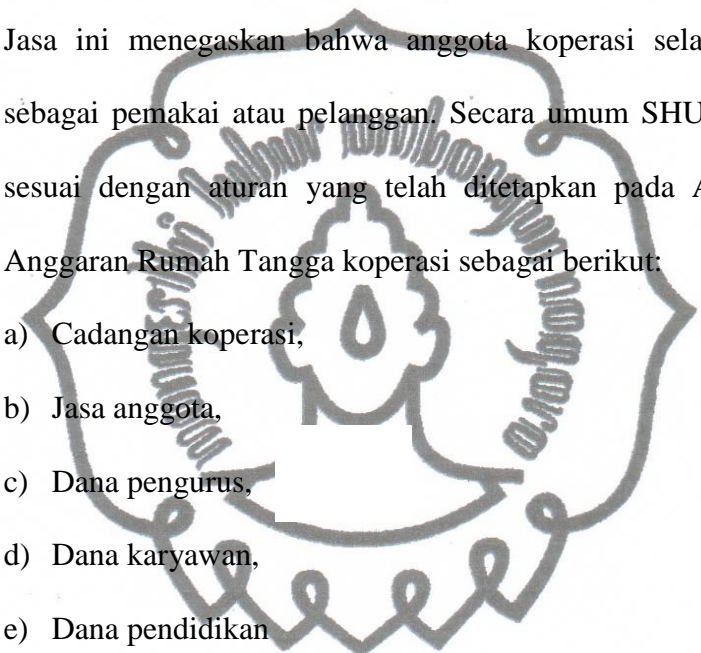
- 1) SHU atas jasa modal

*commit to user*

Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemilik ataupun investor, karena jasa atas modalnya (simpanan) tetap diterima dari koperasinya sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan.

2) SHU atas jasa usaha

Jasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan. Secara umum SHU koperasi dibagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga koperasi sebagai berikut:

- 
- a) Cadangan koperasi,
  - b) Jasa anggota,
  - c) Dana pengurus,
  - d) Dana karyawan,
  - e) Dana pendidikan
  - f) Dana social
  - g) Dana untuk pembangunan lingkungan.

Menurut Tugiman (1999) bahwa pembagian SHU bila diikhtisarkan sebagai berikut :

- 1) SHU- Anggota
  - a) Anggota.
  - b) Cadangan koperasi.
  - c) Dana pengurus.
  - d) Dana pegawai/karyawan.

- e) Dana pendidikan koperasi.
  - f) Dana pembangunan daerah kerja.
  - g) Dana sosial.
- 2) SHU-Non Anggota
- a) Cadangan koperasi.
  - b) Dana pengurus.
  - c) Dana pegawai/karyawan.
  - d) Dana pendidikan koperasi.
  - e) Dana pembangunan daerah kerja.
  - f) Dana sosial.

Berdasarkan pembagian SHU yang dikemukakan di atas, maka pembagian SHU hanya dibagikan kepada anggota dan tidak dibagikan untuk non anggota.

Ada 2 (dua) macam jasa yang merupakan hak anggota dalam SHU yaitu sebagai berikut :

- 1) Jasa usaha yang terdiri dari penjualan dan pembelian sesuai dengan jenis usaha koperasinya.
  - a) Perhitungan jasa penjualan  
Pembagian jasa penjualan kepada masing-masing anggota didasarkan atas perbandingan penjualan yang dilakukan.
  - b) Perhitungan jasa pembelian  
Pembagian jasa pembelian kepada masing-masing anggota tidak berbeda dengan pembagian jasa penjualan.

## 2) Jasa Simpanan (modal)

Pembagian jasa modal kepada anggota yang didasarkan oleh besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib masing-masing anggota. Kecuali bunga simpanan sukarela, jangka waktu dan tingkat bunga. Perhitungan pembagian jasa simpanan wajib dan simpanan pokok kepada masing-masing anggota didasarkan atas perbandingan simpanan yang dilakukan.

## 2.2 Kajian Empiris

Rantau (2002) dalam kajian yang berjudul "Pengaruh Partisipasi Anggota, Kualitas Pengelola, Kualitas Pengurus dan Peranan Pemerintah Terhadap Keberhasilan Usaha Koperasi. ( Kasus KUD di Kabupaten Buleleng Bali )" dengan menggunakan analisis jalur ( Path Analysis ).

Dari Analisis Data diperoleh bahwa Faktor partisipasi anggota, Kualitas pengelola, Kualitas pengurus, dan Peranan pemerintah secara parsial dengan menggunakan Path Analysis mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan usaha KUD, meskipun rendah. Sedangkan secara serempak Faktor partisipasi anggota, Kualitas pengelola, Kualitas pengurus, dan Peranan pemerintah mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan usaha KUD yang cukup tinggi.

Sunardji (1991) dalam penelitian yang berjudul "Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kemandirian Koperasi Unit Desa di Kabupaten Bandung ". Hasil penelitian menunjukkan bahwa status sosial,

pengalaman kerja dan tingkat pengetahuan perkoperasian pengurus koperasi berpengaruh nyata terhadap pelaksanaan tugas pengurus koperasi. Pendidikan formal dan non formal tidak berpengaruh nyata terhadap pelaksanaan tugas pengurus. Keberhasilan pelaksanaan tugas pengurus berpengaruh terhadap keberhasilan koperasi. Serta Keberhasilan KUD berpengaruh secara nyata terhadap kemandirian KUD.

Daerobi (1994) Ilmu Ekonomi dan Pembangunan UNS Surakarta, dengan penelitian yang berjudul "Analisa Partisipasi Anggota dan Hubungannya dengan Keberhasilan Usaha Koperasi Unit Desa di Kab. Klaten. Dengan hasil penelitian sebagai berikut: ada hubungan yang positif antara kualitas pelayanan usaha KUD dengan partisipasi anggotanya. Karakteristik anggota berupa pendidikan, luas lahan, jumlah pekerjaan, usia dan hubungan kekeluargaan dengan pengelola KUD berpengaruh positif terhadap partisipasi anggota dalam kegiatan KUD. Secara individual faktor pendidikan, luas lahan, banyaknya pekerjaan, dan hubungan kekeluargaan anggota dengan pengelola KUD berpengaruh positif terhadap partisipasi anggota dalam kegiatan KUD, sedangkan Usia secara nyata tidak berpengaruh terhadap partisipasi anggota dan ada hubungan yang positif antara partisipasi anggota dengan keberhasilan KUD.

Ismail (2007), dalam penelitian yang berjudul "Pengaruh partisipasi anggota koperasi terhadap SHU di KPRI "Tumbal" Kabupaten Ciamis Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh partisipasi anggota terhadap sisa hasil usaha (SHU) di Koperasi Pegawai

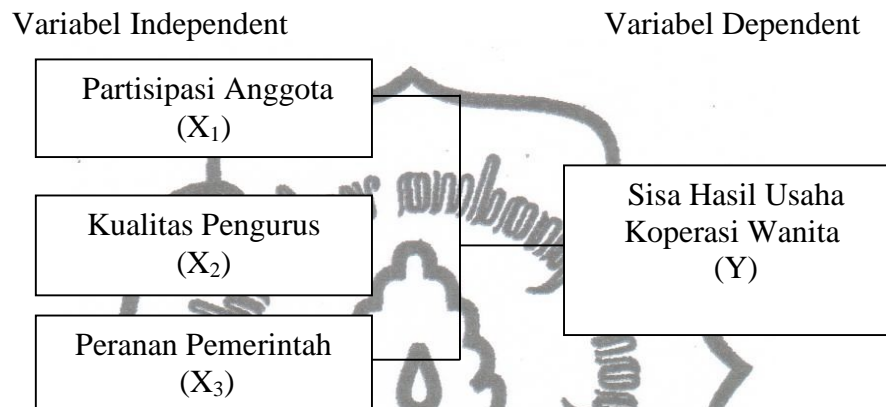
Republik Indonesia (KPRI) “TUMBAL” Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. (2) Untuk mengetahui seberapa besarkah pengaruh partisipasi anggota terhadap sisa hasil usaha (SHU) di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “TUMBAL” Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan anggota KPRI “TUMBAL” Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis yang berjumlah 703 anggota. Pengambilan sample menggunakan simple random sampling yang berjumlah 70 anggota. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel partisipasi anggota sebagai variabel sebagai variabel bebas (X) dan variabel sisa hasil usaha (SHU) sebagai variabel terikat (Y). Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan deskriptif persentase dan analisa regresi sederhana. Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan positif antara variabel partisipasi anggota dengan variabel sisa hasil usaha (SHU) pada KPRI “TUMBAL” Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Semakin tinggi partisipasi anggota terhadap koperasinya maka semakin tinggi pulalah SHU yang diperoleh. Besarnya pengaruh partisipasi anggota terhadap sisa hasil usaha (SHU) pada KPRI “TUMBAL” Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis sebesar 34,7 %.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual dalam penelitian ini merupakan alur pola pikir tentang Analisis Pengaruh Partisipasi Anggota, Kualitas Pengurus dan



Peranan Pemerintah terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Wanita di Kabupaten Ngawi. Untuk memudahkan dan memberikan pola berpikir yang jelas dalam penelitian ini, maka digambarkan dalam suatu bagan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1  
Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan Gambar 2.1 di atas dapat dilihat bahwa Variabel Partisipasi Anggota (X<sub>1</sub>), Kualitas Pengurus (X<sub>2</sub>) dan Peranan Pemerintah (X<sub>3</sub>) mempunyai pengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha (Y). Apabila variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan maka akan menambah atau mengurangi nilai variabel dependent.

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dari perumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini mempunyai beberapa hipotesis sebagai berikut :

- a) Partisipasi anggota, kualitas pengurus dan peranan pemerintah secara

parsial berpengaruh positif terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Wanita di Kabupaten Ngawi .

- b) Partisipasi anggota, kualitas pengurus dan peranan pemerintah secara serempak berpengaruh positif terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Wanita di Kabupaten Ngawi .



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Menurut Nazir (2005) bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Sedangkan Sugiyono (2011:8) menyatakan bahwa metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

#### **3.2 Unit Analisis**

Unit Analisis dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian Kabupaten Ngawi,
- b. Koperasi Wanita Kabupaten Ngawi Penerima Dana Hibah Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009.

### 3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Pengertian populasi menurut Sugiyono (2011:80) adalah wilayah generalisasi atas obyek dan subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah Koperasi Wanita Kabupaten Ngawi Penerima Dana Hibah Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2009 yang berjumlah 96 Koperasi.

Penentuan jumlah sampel menurut Sugiyono (2011:86) dalam tabel penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu dengan taraf kesalahan 1%, 5% dan 10% dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1  
Penentuan Jumlah Sampel Dari Populasi Tertentu Dengan Taraf Kesalahan 1%, 5% dan 10%

N	s		
	1%	5%	10%
10	10	10	10
15	15	14	14
20	19	19	19
25	24	23	23
30	29	28	27
35	33	32	31
40	38	36	35
45	42	40	39
50	47	44	42
55	51	48	46
60	55	51	49
65	59	55	53
70	63	58	56
75	67	62	59
80	71	65	62
85	75	68	65
90	79	72	68
95	83	75	71
100	87	78	73
110	94	84	78
120	102	89	83
130	109	95	88
140	116	100	92

Sumber : Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D

*commit to user*

Berdasarkan tabel di atas, penentuan jumlah sampel dari jumlah populasi sebesar 96 koperasi didapatkan angka 76, sehingga jumlah sampel yang diambil sebanyak 76 Koperasi Wanita Kabupaten Ngawi Penerima Dana Hibah Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2009.

Pengambilan sampel menggunakan teknik *cluster proportional sampling* dari 18 wilayah kecamatan lokasi Koperasi Wanita sampel, kemudian diambil perwakilan berdasarkan jumlah anggota Koperasi Wanita sampel yang terkecil dan yang terbesar. Sebagai contoh di Kecamatan Bringin terdapat 8 Koperasi Wanita, maka untuk menentukan jumlah sampel yang diambil digunakan perhitungan sebagai berikut  $= \frac{76}{96} \times 8 = 6,33$  dan dibulatkan menjadi 6. Adapun penentuan jumlah sampel yang diambil dari tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2  
Penentuan Jumlah Sampel

No	Kecamatan	Jumlah Kopwan	Jumlah Sampel
1	Bringin	8	6
2	Geneng	1	1
3	Gerih	4	3
4	Jogorogo	6	4
5	Karanganyar	7	6
6	Karangjati	2	2
7	Kasreman	4	3
8	Kedunggalar	9	7
9	Kendal	2	2
10	Kwadungan	5	4
11	Mantingan	6	4
12	Ngawi	7	6
13	Ngrambe	2	2
14	Padas	4	3
15	Paron	6	4
16	Pitu	7	6
17	Sine	5	4
18	Widodaren	11	9
<b>Jumlah</b>		<b>96</b>	<b>76</b>

Anggota sampel yang dijadikan responden terdiri dari 3 orang anggota dan 2 pengurus dari tiap Koperasi Wanita Sampel sehingga berjumlah 380 orang.

### 3.4 Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Data primer yaitu data yang diperoleh dari daftar pernyataan (kuesioner) yang diberikan kepada responden untuk menilai kualitas pengurus dan peranan pemerintah.

- b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian Kabupaten Ngawi, berupa Laporan Keragaan Koperasi tahun 2006 sampai dengan 2010, Laporan Bulanan dan data pengurus Koperasi Wanita Kabupaten Ngawi Penerima Dana Hibah Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2009.

### 3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Berdasarkan perumusan masalah, kerangka pemikiran dan hipotesis yang diajukan maka variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Variabel bebas (independent variable), yaitu Partisipasi anggota ( $X_1$ ), kualitas pengurus ( $X_2$ ) dan peranan pemerintah ( $X_3$ ).
- b) Variabel terikat (dependent variable), yaitu Sisa Hasil Usaha Koperasi Wanita di Kabupaten Ngawi ( $Y$ ).

Definisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Partisipasi Anggota ( $X_1$ )

Partisipasi anggota yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah partisipasi anggota sebagai pemilik koperasi yaitu keterlibatan anggota dalam mendukung permodalan koperasi.

Indikator: Diukur dari besarnya Simpanan pokok, wajib dan sukarela anggota dalam rupiah pada akhir tahun 2010.

**b. Kualitas Pengurus (X2)**

Kualitas pengurus adalah kemampuan pengurus dalam mengelola berbagai usaha yang ditawarkan koperasi dan pelayanan kepada anggotanya.

Indikator: - pendidikan pengurus

- pengalaman kerja pengurus
- jumlah pelatihan yang diikuti
- kemampuan pengurus dalam mengelola koperasi,
- kemampuan pengurus dalam melakukan pembukuan koperasi dengan baik,
- pengurus sudah membuat rencana kerja dan melaporkan hasil kegiatannya secara berkala.

Pengukurannya dengan menggunakan kuesioner yang akan dinilai oleh anggota dan pengurus koperasi.

**c. Variabel Peranan Pemerintah (X<sub>3</sub>) :**

Peranan Pemerintah adalah peranan pemerintah dalam memberikan pembinaan, perlindungan dan peluang usaha bagi koperasi dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Indikator: - pemberian modal dan pelatihan oleh pemerintah kepada koperasi

- pembuatan kebijakan yang membantu pengembangan koperasi

*commit to user*



- kebijakan pemerintah untuk memperluas jaringan usaha koperasi
- kebijakan pemerintah membudayakan koperasi pada masyarakat.

Pengukurannya adalah penilaian dari anggota dan pengurus koperasi terhadap peranan pemerintah dengan kuesioner.

d. **Variabel Sisa Hasil Usaha Koperasi Wanita Kabupaten Ngawi (Y)** adalah jumlah Sisa Hasil Usaha pada akhir tahun 2010.

Untuk mengukur variabel dalam penelitian ini digunakan Skala Likert. Dalam pelaksanaannya responden diminta untuk memilih salah satu dari lima alternatif jawaban yang sekaligus menunjukkan lima tingkat persetujuan.

Adapun alternatif jawaban yang disediakan dengan skor masing-masing tingkat persetujuan adalah sebagai berikut :

Nomor	Persetujuan	Kode	Skor
1	Sangat Setuju	SS	5
2	Setuju	S	4
3	Netral	N	3
4	Tidak Setuju	TS	2
5	Sangat Tidak Setuju	STS	1

Dalam tabulasi data dicari total skor untuk masing-masing variabel, kemudian skor-skor tersebut dijumlahkan sehingga akan ditemukan total skor dari masing-masing variabel yang bersangkutan.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah uji regresi linier berganda (*multiple regression analysis*). Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independent yang meliputi partisipasi anggota ( $X_1$ ), kualitas pengurus ( $X_2$ ) dan peranan pemerintah ( $X_3$ ) terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Wanita di Kabupaten Ngawi ( $Y$ ). Pengolahan data menggunakan software SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 17.0. Model persamaan regresi yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

di mana :

$Y$  = Sisa Hasil Usaha Koperasi Wanita Kabupaten Ngawi

$\alpha$  = *Intercept*/konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien regresi

$X_1$  = Partisipasi Anggota

$X_2$  = Kualitas Pengurus

$X_3$  = Peranan Pemerintah

$e$  = *Error of term*

Pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent diuji dengan tingkat kepercayaan (*confidence interval*) 95% atau  $\alpha = 5\%$ .

### 3.6.1 Analisis Data dengan Metode Statistik

Untuk menguji benar tidaknya suatu hipotesa nol ( $H_0$ ) digunakan suatu pendekatan pengujian statistik yang disebut dengan uji signifikansi. Keputusan untuk menerima atau menolak  $H_0$  dibuat atas dasar nilai statistik (Uji t dan Uji F) yang diperoleh dari hasil perhitungan, kemudian dibandingkan dengan nilai tabel pada derajat bebas tertentu. Dari regresi linier berganda dapat diketahui besarnya koefisien masing-masing variabel, kemudian dari koefisien tersebut dapat diketahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama maupun secara terpisah.

#### 3.6.1.1 Uji Signifikansi Secara Parsial ( Uji t )

Kriteria pengujian hipotesis secara parsial adalah sebagai berikut:

$H_0$  :  $\beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$ ; (Partisipasi anggota, kualitas pengurus dan peranan pemerintah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Wanita di Kabupaten Ngawi).

$H_1$  :  $\beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$ ; (Partisipasi anggota, kualitas pengurus dan peranan pemerintah secara parsial berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Wanita di Kabupaten Ngawi).

Untuk menguji hipotesis secara parsial digunakan statistik t ( $t_{test}$ ).

Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, sebaliknya jika

$t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

### 3.6.1.2 Uji Signifikansi Secara Keseluruhan atau simultan ( Uji F )

Kriteria pengujian hipotesis untuk uji serempak (simultan) adalah sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$ ; (Partisipasi anggota, kualitas pengurus dan peranan pemerintah secara serempak tidak berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Wanita di Kabupaten Ngawi).

$H_1 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$ ; (Partisipasi anggota, kualitas pengurus dan peranan pemerintah secara serempak berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Wanita di Kabupaten Ngawi).

Untuk menguji hipotesis secara serempak digunakan statistik F ( $F_{test}$ ), dengan ketentuan jika hasil  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sebaliknya jika hasil  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

### 3.6.1.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Ghozali ( 2001:45) Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan

untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (crosssection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan 1 (satu) variabel independen maka  $R^2$  pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *Ajusted R<sup>2</sup>* pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti  $R^2$ , nilai *Ajusted R<sup>2</sup>* dapat naik atau turun apabila 1 (satu) variabel independen ditambahkan kedalam model.

### 3.7 Uji Asumsi Klasik

#### 3.7.1 Uji Normalitas

Cara yang sering digunakan dalam menentukan apakah suatu model berdistribusi normal atau tidak hanya dengan melihat pada histogram residual apakah memiliki bentuk seperti “lonceng” atau tidak. Cara ini menjadi fatal karena pengambilan keputusan data berdistribusi normal atau tidak hanya berpatok pada pengamatan gambar saja. Ada cara lain untuk menentukan data berdistribusi normal atau tidak dengan

menggunakan rasio skewness dan rasio kurtosis.

Rasio skewness dan rasio kurtosis dapat dijadikan petunjuk apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak. Rasio skewness adalah nilai skewnes dibagi dengan standard error skewness; sedang rasio kurtosis adalah nilai kurtosis dibagi dengan standard error kurtosis. Sebagai pedoman, bila rasio kurtosis dan skewness berada di antara  $-2$  hingga  $+2$ , maka distribusi data adalah normal (Santoso, 2000: 53).

Deteksi normalitas yang sering digunakan pada program SPSS adalah dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada suatu grafik (Santoso, 2001: 214). Dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah sebagai berikut.

- a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi mempunyai residual yang normal.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

### 3.7.2 Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain.

Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi yang lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin – Watson.

Hipotesis yang akan diuji adalah :

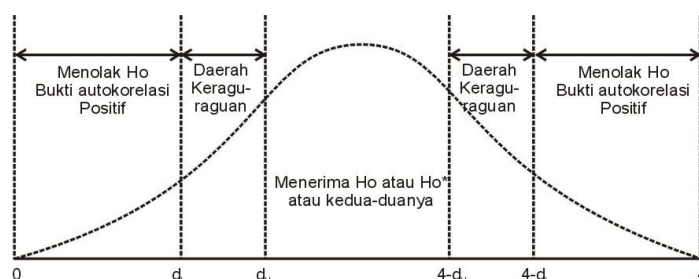
$H_0$  : tidak ada autokorelasi

$H_1$  : ada autokorelasi

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dilakukan berdasarkan pada nilai Durbin–Watson-nya.

- 1) Jika  $DW < D_L$ ,  $H_0$  ditolak sehingga dinyatakan terjadi autokorelasi.
- 2) Jika  $DW > 4 - D_L$ ,  $H_0$  ditolak sehingga dinyatakan terjadi autokorelasi.
- 3) Jika  $D_U < DW < 4 - D_U$ ,  $H_0$  diterima sehingga dinyatakan tidak terjadi autokorelasi positif atau negatif. (Ghozali 2001 : 61).

Sebagai gambaran dari daerah diterima dan ditolak, untuk uji ini dapat ditunjukkan gambar uji Durbin Watson sebagai berikut :



Gambar 3.1  
Gambar Uji Durbin-Watson

*commit to user*

### 3.7.3 Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Heteroskedastisitas berarti variasi (varians) variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Pada heteroskedastisitas kesalahan yang terjadi tidak random (acak) tetapi menunjukkan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel independen. Misalnya, heteroskedastisitas akan muncul dalam bentuk residu yang semakin besar jika pengamatan semakin besar. Rata-rata residu akan semakin besar untuk pengamatan variabel independen (X) yang semakin besar.

Heteroskedastisitas dalam regresi dapat diketahui dengan menggunakan Uji Glejser yang secara umum dinotasikan sebagai berikut:

$$|e| = b_1 + b_2 X_2 + v$$

Dimana:

$|e|$  = Nilai Absolut dari residual yang dihasilkan dari regresi model

$X_2$  = Variabel penjelas

$v$  = variabel pengganggu

Bila variabel penjelas secara statistik signifikan mempengaruhi residual maka dapat dipastikan model ini memiliki masalah

*commit to user*



Heteroskedastisitas.

### 3.7.4 Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah menunjukkan adanya hubungan linear diantara variabel indenpenden. Kondisi ini harus dihindari agar hasil pengujian tidak bias.

Apabila terjadi hubungan linier antar variabel independen maka :

- 1) Koefisien regresi dari variabel bebas tidak bisa diestimasi
- 2) Rentang dari tingkat keyakinan menjadi semakin lebar
- 3) Oleh karena antar variabel independen berhubungan, tidak mungkin kita memisahkan variabel secara individual.

Pengujian multikolinieritas dalam penelitian ini akan menggunakan nilai *Varian Inflation Factor* ( *VIF* ) yang diperoleh dari pengujian hipotesis. Kriteria terjadinya multikolinieritas adalah apabila *VIF* lebih besar 10 berarti terjadi masalah yang berkaitan dengan multikolinieritas, sebaliknya apabila nilai *VIF* dibawah 10 maka model regresi tidak mengandung multikolinieritas ( Gujarati, 2003:372)

## BAB IV

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

##### 4.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Ngawi terletak di wilayah barat Propinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.298,58 km<sup>2</sup>, di mana sekitar 39 persen atau sekitar 504,8 km<sup>2</sup> berupa lahan sawah. Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ngawi tahun 2004, secara administrasi wilayah ini terbagi ke dalam 19 kecamatan, 213 desa dan 4 kelurahan.

Secara geografis Kabupaten Ngawi terletak pada posisi 7° 21' – 7° 31' Lintang Selatan dan 110° 10' – 111° 40' Bujur Timur. Topografi wilayah ini adalah berupa dataran tinggi dan tanah datar. Tercatat 4 kecamatan terletak pada dataran tinggi yaitu Sine, Ngrambe, Jogorogo dan Kendal yang terletak di kaki Gunung Lawu.

Batas wilayah Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora (Propinsi Jawa Tengah) dan Kabupaten Bojonegoro.
- Sebelah Timur: Kabupaten Madiun.
- Sebelah Selatan: Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan.
- Sebelah Barat: Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen (Propinsi Jawa Tengah).

#### 4.1.2 Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Ngawi akhir tahun 2009 adalah 892.051 jiwa, terdiri dari 438.223 penduduk laki-laki dan 453.828 penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin/*sex ratio* sebesar 96 artinya bahwa setiap 100 penduduk wanita terdapat sekitar 96 penduduk laki-laki.

Jumlah penduduk Kabupaten Ngawi tahun 2009 bila dibandingkan dengan tahun 2008 bertambah sebesar 2.827 jiwa atau meningkat sebesar 0.32 % selama setahun. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Paron dengan penduduk 89.366 jiwa, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Kasreman yaitu 24.019 jiwa.

Kepadatan penduduk menunjukkan rasio antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Ngawi tahun 2009 adalah 688 jiwa/km<sup>2</sup>, naik sekitar 5 jiwa untuk setiap kilometer persegi dari tahun sebelumnya. Tingkat kepadatan per kecamatan tertinggi di Kecamatan Ngawi (1196 jiwa/km<sup>2</sup>) dan tingkat kepadatan terendah adalah Kecamatan Karanganyar (228 jiwa/km<sup>2</sup>).

Jumlah kelahiran penduduk selama tahun 2009 adalah 6.243 jiwa, terdiri dari 3.251 penduduk laki-laki dan 2.992 penduduk perempuan. Jika dibandingkan dengan tahun 2008 terjadi peningkatan hingga 25,89 %. Jumlah kematian pada tahun 2009 tercatat sebesar 3.755 jiwa, yang terdiri dari 1.993 penduduk laki-laki dan 1.762 penduduk perempuan. Jika dibandingkan dengan tahun 2008, terjadi kenaikan sebesar 21.72 %.

### 4.1.3 Sosial

Data dari Departemen Agama Kabupaten Ngawi menunjukkan mayoritas penduduk Kabupaten Ngawi beragama Islam dengan persentase sekitar 99 %. Jumlah penduduk menurut agama yang dipeluk kondisi akhir tahun 2009 adalah Islam 893.334 jiwa, Katholik 5.130 jiwa, Kristen 4.840 jiwa, Hindu 48 jiwa, Budha 142 jiwa dan lainnya 28 jiwa.

Jumlah tempat ibadah pada tahun 2009 terdiri dari masjid 1.382 bangunan, mushola 3.960 bangunan, gereja 77 bangunan, kuil 1 bangunan dan vihara 2 bangunan. Jumlah jamaah haji Kabupaten Ngawi tahun 2009 adalah 203 orang, terdiri dari 110 calon jamaah wanita dan 95 calon jamaah laki-laki. Jumlah pondok pesantren di Kabupaten Ngawi tahun 2009 mencapai 130 pesantren, dengan jumlah santri mencapai 13.290 santri.

Data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi 2009 menunjukkan bahwa jumlah TK sebanyak 456 lembaga dengan jumlah murid 11.770 siswa, dengan rasio murid-sekolah 26. Jumlah SD dan sederajat ada 685 lembaga, mempunyai murid 22.148 siswa dengan rasio murid-sekolah 32. Jumlah murid SMP dan sederajat sebanyak 36.810 siswa, yang tersebar di 111 sekolah dengan rasio murid-sekolah 332. Jumlah murid SMU/SMK 23 378 siswa yang tersebar di 67 sekolah, dengan rasio murid sekolah 349.

Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi menunjukkan bahwa terdapat beberapa sarana kesehatan yang jumlahnya meningkat pada tahun 2009, antara lain: praktek dokter dari 80 menjadi 120, praktek bidan

dari 102 menjadi 261, apotik dari 38 menjadi 42 dan Posyandu dari 1.164 menjadi 1.168.

Jumlah kelahiran pada tahun 2009 tercatat sebanyak 13.129 dimana 13.120 persalinan ditolong oleh dokter/bidan dan 9 persalinan lainnya ditolong oleh dukun. Walaupun masih ada persalinan yang ditolong dukun, namun dari tahun ke tahun jumlahnya menurun. Angka tersebut mengindikasikan bahwa pola pikir para orang tua telah bergeser ke arah yang modern dan lebih mengutamakan keselamatan.

Peserta KB Aktif tahun 2009 naik 1,9 % dibandingkan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2008 mencapai 131.655 peserta naik menjadi 134.222 peserta pada tahun 2009. Dari peserta KB Aktif tersebut sekitar 55,28 % diantaranya menggunakan KB suntik dan 22,07 % menggunakan IUD. Dari jumlah pasangan usia subur di Kabupaten Ngawi angka prevalensi KB pada tahun 2009 mengalami penurunan sekitar 0,21% yaitu dari 70.38% tahun 2008 menjadi 70,18% pada tahun 2009.

#### **4.1.4 Pertanian**

Luas lahan pertanian tahun 2008 mencapai 84,7% dari luas wilayah Kabupaten Ngawi. Hal ini menggambarkan sektor pertanian merupakan sektor andalan bagi penduduk Ngawi. Seperti tahun sebelumnya, produksi padi tahun 2009 mengalami kenaikan dari 673.869 ton pada tahun 2008 menjadi 719.385 ton. Diharapkan kenaikan tersebut terus berlanjut dan predikat sebagai lumbung padi Jawa Timur dapat dipertahankan.

#### 4.1.5 Industri

Sektor industri di Kabupaten Ngawi berjalan lambat namun terus meningkat baik jumlah usaha maupun nilai produksinya. Jumlah industri kecil/kerajinan rumahtangga naik dari 15.075 pada tahun 2008 menjadi 15.346 pada tahun 2009. Nilai produksi dari usaha di atas juga meningkat dari 99,82 milyar rupiah pada tahun 2008 menjadi 109,962 milyar rupiah pada tahun 2009.

Jumlah pelanggan listrik PLN pada tahun 2009 mencapai 168.782 pelanggan, meningkat sekitar 3,26% dari tahun 2008 yang mencapai 163.447 pelanggan. Nilai penjualan sektor ini juga meningkat sekitar 21,89% dari 80,53 milyar rupiah pada tahun 2008 menjadi 98,16 milyar rupiah pada tahun 2009.

Jumlah pelanggan PDAM mengalami peningkatan dari 17.754 pada tahun 2008 menjadi 19.750 pelanggan pada tahun 2009. Total produksi air minum yang disalurkan pada tahun 2009 mencapai 4,494 juta m<sup>3</sup>, meningkat sekitar 8,6 % dari tahun sebelumnya yang sebesar 4,137 juta m<sup>3</sup>.

#### 4.1.6 Keuangan Daerah

Total realisasi penerimaan daerah pada tahun 2009 sebesar 797,745 milyar rupiah, meningkat sekitar 11,75% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2009 hanya menyumbang 25,894 milyar rupiah atau sekitar 3,2% dari total penerimaan. Dana Alokasi Umum (DAU) masih menjadi penyokong terbesar bagi

penerimaan Kabupaten Ngawi. Pada tahun 2009 ini Kabupaten Ngawi memperoleh DAU sebesar 555,625 milyar rupiah atau sekitar 69,65% dari total penerimaan daerah.

Total realisasi belanja Kabupaten Ngawi tahun 2009 mencapai 803,673 milyar rupiah, hanya meningkat sekitar 5,69% dari tahun 2008 yang mencapai 760,350 milyar rupiah.

#### 4.1.7 Ekonomi

Gambaran menyeluruh tentang kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dapat dilihat melalui neraca ekonominya. Salah satu indikator yang sering digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Kabupaten Ngawi menurut harga berlaku tahun 2008 mencapai 5,770 milyar rupiah, naik sekitar 12,8% dari tahun 2007 yang mencapai 5,031 milyar rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (2000) mencapai 2,785 milyar rupiah, naik sekitar 5,24% dari tahun sebelumnya yang mencapai 2,639 milyar rupiah.

Perekonomian Kabupaten Ngawi sampai dengan tahun 2008 masih didominasi sektor pertanian. Sumbangan sektor ini terhadap total PDRB sampai dengan 2008 sekitar 36,9 persen. Tidaklah aneh bila sektor ini menjadi sektor unggulan bagi Kabupaten Ngawi. Namun demikian sumbangan sektor ini dari tahun ke tahun terus menunjukkan penurunan walaupun sebenarnya secara produksi mengalami pertumbuhan. Sektor lainnya yang memberi sumbangan cukup besar terhadap perekonomian

Kabupaten Ngawi adalah sektor perdagangan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sumbangan sektor ini selalu di atas 25% dari total PDRB.

Pendapatan per kapita merupakan indikator yang sangat dikenal terutama oleh beberapa kalangan dan sering dipakai untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu daerah. Pendapatan perkapita menunjukkan besarnya pendapatan yang diterima oleh penduduk dalam kurun waktu 1 tahun. Salah satu ukuran yang digunakan untuk pendekatan pendapatan perkapita adalah PDRB per kapita. Berdasarkan perhitungan atas dasar harga berlaku, pendapatan regional per kapita penduduk Kabupaten Ngawi Tahun 2008 sebesar Rp. 6.332.350,61 meningkat sekitar 12,31% dari tahun 2007 yang hanya mencapai Rp. 5.552.980,71. Pendapatan regional per kapita atas dasar harga konstan (2000) mencapai Rp 3.056.652,66 meningkat sekitar 4,7% dari tahun 2007 yang mencapai Rp. 2.913.347,79.

## **4.2 Gambaran Umum Obyek Penelitian**

### **4.2.1 Sejarah Koperasi Wanita Kabupaten Ngawi**

Masyarakat sekitar hutan, selama ini identik dengan kultur sosial yang sangat kuat. Mereka benar – benar mencerminkan sosok masyarakat yang sangat rukun, guyup dan selalu mengedepankan gotong royong di dalam setiap kegiatan desanya.

Seiring perkembangan jaman dan tuntutan kehidupan sosial yang makin tinggi, kebiasaan yang selama ini terjaga dengan baik akhirnya terkikis juga. Mereka menebang hutan dengan seenaknya sendiri yang



akhirnya menimbulkan kerusakan hutan yang cukup parah. Hal tersebut tidak terlepas dari faktor rendahnya tingkat pendidikan, sosial, ekonomi masyarakatnya kemudian dipicu pula oleh tingkat pengangguran yang tinggi karena minimnya lapangan kerja serta semakin tingginya jumlah penduduk. Pemerintah Kabupaten Ngawi memandang perlu ada pembinaan masyarakat sekitar wilayah hutan berupa peningkatan sumber daya dan kualitas masyarakat wilayah hutan khususnya kaum perempuan berupa pembentukan KPDH (Kelompok Perempuan Desa Hutan).

Pembalakan liar (illegal logging) oleh masyarakat kawasan hutan sekitar tahun 1997 – 2000 mengakibatkan kawasan hutan menjadi gundul. Melihat situasi dan kondisi masyarakat desa hutan yang sudah mencapai titik ambang krisis moral dan sosial, maka untuk menyelamatkan hutan yang telah rusak, Perum Perhutani menggulirkan system Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat ( PHBM ) yang mulai disosialisasikan pada tahun 2003 dengan mengajak masyarakat sekitar hutan ikut serta mengelola kawasan hutan.

Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat ( PHBM ) pada awalnya tidak berdampak signifikan bagi kehidupan masyarakat di sekitar hutan. Diprakarsai oleh Yayasan Palapa yang bekerja sama dengan Perum Perhutani KPH Ngawi dan Pemerintah Kabupaten Ngawi akhirnya terbentuklah Lembaga Masyarakat Desa Hutan ( LMDH ) pada tahun 2004.

Pada awalnya tujuan dibentuknya LMDH sendiri adalah untuk membantu mengimplementasikan program PHBM di KPH Ngawi, Penguatan sumber daya lokal sekitar kawasan hutan serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah hutan. Berbagai macam cara dilakukan agar LMDH bisa tertata dan menjadi lembaga yang kuat dalam rangka ikut membantu mengimplementasikan program dari PHBM.

Salah satu upaya mempertajam dan mempercepat implementasi program PHBM adalah pelaksanaan Program pemberdayaan perempuan khususnya dalam pelatihan sumber daya manusia melalui Kelompok Perempuan Desa Hutan ( KPDH ) pada Tahun 2007. KPDH ini adalah kelompok yang beranggotakan perempuan desa hutan, yang pada awal pembentukannya dalam setiap kegiatan berfokus untuk meningkatkan pendapatan keluarga/income perkapita keluarga. Tujuan pembentukannya adalah guna mewujudkan komunikasi yang berkelanjutan tentang PHBM dan meluas pada upaya meningkatkan pendapatan keluarga miskin sekitar hutan yang mempunyai kapasitas personal atau kelembagaan yang terampil, utamanya perempuan Desa Hutan dalam memanfaatkan potensi yang ada, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Desa Hutan serta memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan yang produktif.

Jumlah KPDH pada awal berdirinya hanya ada 8 kelompok yang terbentuk pertama kali di Desa Gandong Kecamatan Bringin yang bergerak dalam kegiatan pembuatan tas plastik. Seiring berkembangnya waktu dari tahun ke tahun jumlah KPDH terus meningkat karena hasilnya

dapat dirasakan oleh ibu - ibu Desa Hutan. Keberadaan KPDH ini terus berkembang dari 8 kelompok di tahun 2007, menjadi 22 di tahun 2008, selanjutnya 75 di tahun 2009 dan sampai tahun 2010 telah terbentuk di seluruh desa hutan yang berjumlah 95 desa.

Hasil yang dirasakan dari pembentukan KPDH mulai tahun 2007 – 2010 adalah terbentuknya Paguyuban KPDH, kegiatan Arisan dan kebiasaan menabung, Usaha Simpan Pinjam serta Pertemuan Rutin 3 bulan sekali dengan menghadirkan Narasumber dari pihak yang berkompeten, baik dari praktisi maupun akademisi dan dari pemerintah Kabupaten Ngawi.

Hasil yang bisa dirasakan oleh perempuan di desa hutan adalah dari kegiatan pembuatan anyaman tas plastik di wilayah timur khususnya di Desa Dero dan Desa Gandong Kecamatan Bringin , Desa Pacing Kecamatan Padas, setelah diawali dengan pemberian pelatihan menganyam hingga kemudian bisa memproduksi bekerjasama dengan pengusaha sebagai pemasok bahan baku dan penampung hasil sekaligus pemasarannya setiap bulan kelompok tersebut bisa memproduksi 20.000 - 30.000 tas plastik dengan pendapatan per KK Rp.20.000 - Rp. 25.000 per hari. Kelompok wilayah barat dipasarkan secara mandiri oleh KPDH itu sendiri. Apabila diakumulasi dalam satu bulan maka sudah ada pendapatan tambahan sebesar Rp. 600.000 - Rp. 750.000 per KK artinya sudah di atas UMR Kab. Ngawi.

Dalam rangka untuk meningkatkan peran serta Penguatan Kelembagaan KPDH, Pemerintah Kabupaten Ngawi melakukan kegiatan Pelatihan dan Pembinaan dengan melibatkan seluruh *stake holder* yang ada di Kabupaten Ngawi ( Satker terkait, KPH Ngawi, LMDH, Pemerintahan Desa, dan pihak Swasta/LSM Palapa).

Pada tahun 2007 KPDH menerima bantuan dari Tim Penggerak PKK Kab. Ngawi bagi 8 kelompok KPDH yang masing - masing menerima Rp. 300.000.-. Pada tahun 2008 Tim Penggerak PKK Kab. Ngawi juga kembali memberikan bantuan permodalan bagi 14 KPDH yang terbentuk pada tahun itu. Seiring perjalanan waktu, KPDH itu sendiri akhirnya juga bergerak pada jenis kegiatan pembuatan kue kering khususnya di Kecamatan Gerih, Kecamatan Widodaren dan Kecamatan Kedunggalar serta Usaha Simpan Pinjam.

Setelah KPDH terbentuk selama 2 tahun, diadakan evaluasi sejauh mana pelaksanaan kegiatan KPDH itu. Hasilnya sungguh luar biasa, omset permodalan dari KPDH itu bertambah sekitar 5 - 7 juta per tahun. Kegiatan evaluasi dilaksanakan setiap sebulan sekali melalui media pertemuan rutin kelompok . Selain itu juga ada pertemuan Paguyuban KPDH setiap 3 bulan sekali. Diharapkan dengan adanya evaluasi ini perkembangan dari masing - masing KPDH bisa terpantau sekaligus apabila ditemukan permasalahan dapat segera dicarikan solusinya.

Dampak dari keberhasilan perkembangan KPDH yang ada di Ngawi ini akhirnya direspon oleh Bapak Gubernur Jatim Soekarwo

dengan memberikan bantuan Hibah sebesar Rp. 25.000.000,- per KPDH/Kopwan yang ada di Ngawi sejumlah 95 KPDH (Tahun 2009) dan juga pada Tahun 2010 bantuan untuk 122 Desa di luar KPDH yang disalurkan melalui Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Propinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi.

Pelaksanaan program KPDH selama ini sudah bisa dirasakan manfaatnya oleh mereka yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Adapun capaian atau keberhasilan yang sudah diperoleh adalah penyerapan tenaga kerja. Setiap KPDH dapat menyedot jumlah tenaga kerja lebih dari 50 orang yang otomatis hal ini mengurangi jumlah angka pengangguran. Dari jumlah tersebut maka paling tidak Koperasi Wanita Se Kabupaten Ngawi dapat menyerap tenaga kerja sejumlah 10.850 orang, tentunya suatu kontribusi yang luar biasa bagi upaya pengentasan kemiskinan ditambah lagi dengan adanya pendapatan tambahan sebesar 20 - 25 ribu per hari/KK (600 - 750 ribu per bln/KK)

#### **4.2.2 Prestasi Koperasi Wanita Kabupaten Ngawi**

Prestasi yang telah dicapai oleh Koperasi Wanita di Kabupaten Ngawi selama perkembangannya antara lain adalah sebagai berikut :

- Menyerap 10.850 orang
- Peningkatan pendapatan Rp. 600.000 – 700.000 per bulan per KK

- Pemegang rekor MURI untuk pembuatan Kruistik Replika Bendera Merah Putih yang sepanjang 52,6 meter.
- Diundang oleh Ibu Ani Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Pemberdayaan Perempuan untuk mengikuti acara kenegaraan dalam rangka Peringatan Puncak Hari Ibu di TMII bulan Desember 2007.
- Undangan kenegaraan Peringatan 1 (satu) Abad Kebangkitan Perempuan Indonesia di Silang Monas Jakarta Tahun 2008.
- Mendapatkan kucuran dana HIBAH sebesar Rp. 25.000.000,- untuk masing - masing kelompok dari Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Propinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi.
- Pemberian insentif setiap bulan untuk 3 Orang pengurus KOPWAN (100 rb/orang/bln) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- Satu - satunya Kabupaten di Jawa Timur yang setiap desanya sudah memiliki Koperasi Wanita (KOPWAN).

#### **4.2.3 Program Gubernur Soekarwo untuk menjadikan Jawa Timur sebagai Provinsi Koperasi**

Jumlah koperasi wanita di Jawa Timur saat ini mencapai 8.506 unit. Koperasi wanita ini merupakan program Gubernur Soekarwo untuk menjadikan Jawa Timur sebagai Provinsi Koperasi. Dalam 2 tahun, 8.506 koperasi ini berhasil dibentuk dengan cara memberikan bantuan modal sebesar Rp. 25 juta per koperasi. Hampir 220 Milyar dana digelontorkan untuk pembentukan koperasi ini. Selama 2 tahun ini, hampir seluruh Dinas

Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota di Jawa Timur berusaha keras membentuk koperasi wanita. 38 kabupaten/kota di Jawa Timur telah membentuk 8.506 koperasi wanita dan mendapatkan dana bantuan modal pembentukan sebesar Rp. 5,6 Milyar dengan jumlah anggota sebanyak  $\pm$  300.000 orang.

Jika ukuran keberhasilan diukur berdasarkan kuantitas pembentukan koperasi, maka jumlah koperasi yang berhasil dibentuk adalah sebuah prestasi. Kita seringkali silau dan terpukau oleh angka-angka. Angka hanyalah angka yang tidak bisa berbicara banyak selain menunjukkan jumlah. Angka akan bermanfaat untuk analisa dan dapat mengungkap banyak fakta jika dibandingkan dengan angka lain.

Penerapan model pembentukan Top Down ini harus diikuti dengan sistem pengendalian dan pengawasan. Pengawasan dan pengendalian terhadap penyalur dan penerima dana harus terus ditingkatkan, agar penyimpangan yang tidak diharapkan tidak terjadi. Beberapa program pemerintah yang dirancang, justru menyeret aparatur negara atau penerima dana pada kasus tindakan pidana korupsi.

### **4.3 Analisis Deskripsi Sampel**

Koperasi wanita yang dijadikan sampel penelitian ini merupakan koperasi wanita yang mendapatkan dana hibah dari Provinsi Jawa Timur tahun 2009 yang berjumlah 76 Koperasi Wanita dan didirikan mulai tanggal

14 September 2009 sampai dengan 23 Desember 2009. Seluruh anggota, Pengurus dan Pengawas berjenis kelamin perempuan.

#### 4.3.1 Pengurus

Jumlah pengurus di setiap Koperasi Wanita Sampel berjumlah 3 orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Semua pengurus diangkat pada saat pendirian Koperasi Wanita tersebut dan belum ada pergantian pengurus. Adapun tingkat pendidikan formal pengurus dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1  
Tingkat Pendidikan Formal Pengurus Koperasi Wanita Sampel

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase
Tamat SMA atau sederajat	152	40,00%
D-III	41	10,79%
S-1	35	9,21%
<b>Total</b>	<b>228</b>	<b>60%</b>

Sumber : Hasil Olah Data

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar pengurus mempunyai tingkat pendidikan formal Tamat SMA atau sederajat, yaitu sebanyak 152 orang atau 40 %. Tingkat pendidikan formal pengurus yang lainnya adalah tamat D-III sebanyak 41 orang atau 10,79 % dan tamat S-1 sebanyak 35 orang atau 9,21 %.

Koperasi sebagai badan usaha membutuhkan keterampilan dan kemampuan dari setiap pengurus agar roda organisasi dapat berjalan dan mengalami peningkatan yang baik dan berkesinambungan. Berdasarkan data tentang tingkat pendidikan formal pengurus sebagian besar adalah tamat



SMA atau sederajat dimana pelajaran tentang perkoperasian masih dianggap minimum, maka diharapkan pengurus dapat menambah pengetahuannya dengan jalan usaha sendiri, dari membaca buku ataupun mengikuti pelatihan dan kursus-kursus tentang perkoperasian. Jumlah pelatihan perkoperasian yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Ngawi untuk Koperasi Wanita penerima dana hibah dari Provinsi Jawa Timur tahun 2009 adalah sebanyak 2 kali yang diikuti oleh semua pengurus. Para Pengurus juga telah membentuk paguyupan pengurus yang tersebar di 4 wilayah eks kawedanan kabupaten Ngawi sebagai salah satu tempat untuk bertukar informasi tentang kemajuan koperasinya.

#### **4.3.2 Simpanan Anggota**

Jumlah anggota Koperasi Wanita Sampel adalah 4.021 orang. Berdasarkan Lampiran 3, dari 76 Koperasi Wanita Sampel terdapat koperasi yang mempunyai simpanan anggota tertinggi yaitu Koperasi Wanita Harapan Bunda Kecamatan Ngawi sebesar Rp. 7.378.000.000,- dan yang terendah adalah Koperasi Wanita Hidayah Kecamatan Mantingan sebesar Rp. 875.000,-. Adapun Jumlah Simpanan Anggota Koperasi Wanita Sampel pada akhir tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah ini :

Tabel 4.2  
Jumlah Simpanan Anggota Koperasi Wanita Sampel Pada Akhir Tahun 2010

Jumlah Simpanan	Jumlah Koperasi	Prosentase
Sampai dengan Rp. 1.000.000,-	4	5,26%
Rp. 1.000.001,- - Rp. 2.000.000,-	15	19,74%
Rp. 2.000.001,- - Rp. 3.000.000,-	21	27,63%
Rp. 3.000.001,- - Rp. 4.000.000,-	<b>22</b>	28,95%
Rp. 4.000.001,- - Rp. 5.000.000,-	6	7,89%
Rp. 5.000.001,- - Rp. 6.000.000,-	4	5,26%
Rp. 6.000.001,- - Rp. 7.000.000,-	2	2,63%
di atas Rp. 7.000.000,-	2	2,63%
Jumlah	76	100,00%

Sumber : Hasil Olah Data

#### 4.3.3 Sisa Hasil Usaha

Berdasarkan Lampiran 3, dari 76 Koperasi Wanita Sampel terdapat koperasi yang dapat mengumpulkan Sisa Hasil Usaha tertinggi yaitu Koperasi Wanita Mustika Kecamatan Ngawi sebesar Rp. 8.218.700,- dan yang terendah adalah Koperasi Wanita Angrek Kecamatan Kwadungan sebesar Rp. 597.600,-. Adapun Jumlah Sisa Hasil Usaha Koperasi Wanita Sampel pada akhir tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 4.3 di bawah ini :

Tabel 4.3  
Jumlah Sisa Hasil Usaha Koperasi Wanita Sampel Pada Akhir Tahun 2010

Jumlah Simpanan	Jumlah Koperasi	Prosentase
sampai dengan Rp. 1.000.000,-	4	5,26%
Rp. 1.000.001,- - Rp. 2.000.000,-	5	6,58%
Rp. 2.000.001,- - Rp. 3.000.000,-	12	15,79%
Rp. 3.000.001,- - Rp. 4.000.000,-	<b>15</b>	19,74%
Rp. 4.000.001,- - Rp. 5.000.000,-	17	22,37%
Rp. 5.000.001,- - Rp. 6.000.000,-	11	14,47%
Rp. 6.000.001,- - Rp. 7.000.000,-	7	9,21%
di atas Rp. 7.000.000,-	5	6,58%
Jumlah	76	100,00%

Sumber : Hasil Olah Data

#### 4.4 Estimasi Model Analisis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependent. Pada penelitian ini akan mengestimasi faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha (Y) sebagai variabel terikat dengan menggunakan partisipasi anggota ( $X_1$ ), kualitas pengurus ( $X_2$ ) dan peranan pemerintah ( $X_3$ ) sebagai variabel bebasnya. Sehingga bentuk dari persamaan linear berganda pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Dimana :

Y : Sisa Hasil Usaha

$\alpha$  : Konstanta / intercept

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : Koefisien regresi

*commit to user*

- $\varepsilon$  : Error atau variabel gangguan  
 $X_1$  : Partisipasi Anggota  
 $X_2$  : Kualitas Pengurus  
 $X_3$  : Peranan Pemerintah

#### 4.4.1 Regresi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha

Hasil dari regresi pada persamaan diatas didapatkan fungsi regresi seperti pada Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4  
Hasil Regresi Y

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-1905200.869	666652.370		-2.858	.006
Partisipasi Anggota	1.217	.048	.915	25.245	.000
Kualitas Pengurus	5742.004	2873.614	.075	1.998	.049
Peranan Pemerintah	6645.373	3029.892	.081	2.193	.032

Sumber : Hasil olah data SPSS 17.0

Berdasarkan hasil regresi diatas, maka persamaan regresi linier berganda yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

$$Y = -1905200,869 + 1,217 X_1 + 5742,004 X_2 + 6645,373 X_3 + \varepsilon$$

Dari fungsi regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Apabila variabel  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  sama dengan nol, maka besarnya variabel Y sama dengan nilai konstanta yaitu -1905200,869 dimana nilai variabel yang lain tetap.

- Apabila nilai  $X_1$  naik 1 satuan maka nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 1,217 dimana nilai variabel yang lain tetap.
- Apabila nilai  $X_2$  naik 1 satuan maka nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 5742,004 dimana nilai variabel yang lain tetap.
- Apabila nilai  $X_3$  naik 1 satuan maka nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 6645,373 dimana nilai variabel yang lain tetap.

#### 4.4.1.1 Uji Statistik

##### a. Uji t

Pengujian terhadap koefisien regresi masing-masing variabel bebas, jika besarnya  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  atau  $-t_{hitung}$  lebih kecil dari  $-t_{tabel}$  maka variabel bebas tersebut berpengaruh signifikan. Sedangkan jika sebaliknya maka variabel bebas tidak signifikan. Selain cara tersebut terdapat cara lain untuk melakukan uji t yaitu dengan melihat tingkat signifikannya/probabilitinya. Jika nilai signifikan  $< 0.1$ , maka variabel tersebut signifikan pada tingkat signifikansi 10% dan nilai signifikan  $< 0.05$ , maka variabel tersebut signifikan pada tingkat signifikansi 5%.

- Hipotesis :  $H_0 : \alpha_i = 0$

$$H_a : \alpha_i \neq 0$$

- $t_{tabel} t_{\alpha; N - K}$

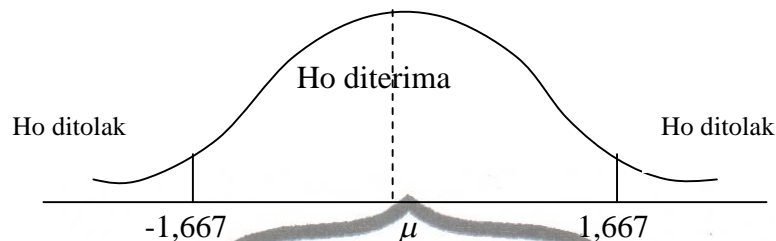
$$t_{0.05; 72} = 1,667$$

dimana  $\alpha$  = derajat signifikansi

*commit to user*

$N$  = jumlah sampel (76)

$K$  = banyaknya variabel (4)



Gambar 4.1  
Uji t

Tabel 4.5  
Penjelasan Uji t

Variabel	tStatistik/ t-hitung	t-tabel	Prob / Tingkat Signifikan	Kesimpulan
$X_1$ : Partisipasi Anggota	25,245	1,667	.000	Signifikan pada $\alpha = 5\%$
$X_2$ : Kualitas Pengurus	1.998	1,667	.049	Signifikan pada $\alpha = 5\%$
$X_3$ : Peranan Pemerintah	2.193	1,667	.032	Signifikan pada $\alpha = 5\%$

Sumber : Hasil olah data SPSS 17.0

Dari persamaan regresi diatas diperoleh hasil sebagai berikut:

- Pada variabel partisipasi anggota diketahui t hitung sebesar 25,245 jika dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  (1,667) pada  $\alpha = 5\%$  dan  $N = 76$ , maka diperoleh nilai  $t_{hitung}$  terletak di daerah Ho ditolak atau H1 diterima, berarti variabel partisipasi anggota secara sendiri berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel sisa hasil usaha Koperasi Wanita Kabupaten Ngawi pada  $\alpha = 5\%$ .

- Pada variabel kualitas pengurus diketahui  $t_{hitung}$  sebesar 1,998 yang jika dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  (1,662) pada  $\alpha = 5\%$  dan  $N = 76$ , maka diperoleh nilai  $t_{hitung}$  terletak di daerah  $H_0$  ditolak atau  $H_1$  diterima, berarti variabel kualitas pengurus secara sendiri berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel sisa hasil usaha Koperasi Wanita Kabupaten Ngawi pada  $\alpha = 5\%$ .
- Pada variabel peranan pemerintah diketahui  $t_{hitung}$  sebesar 2,193 yang jika dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  (1,662) pada  $\alpha = 5\%$  dan  $N = 76$ , maka diperoleh nilai  $t_{hitung}$  terletak di daerah  $H_0$  ditolak atau  $H_1$  diterima, berarti variabel peranan pemerintah secara sendiri berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel sisa hasil usaha Koperasi Wanita Kabupaten Ngawi pada  $\alpha = 5\%$ .

#### b. Uji F

Uji ini digunakan untuk menguji signifikansi atau mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent secara bersama-sama. Pada peregresian variabel-variabel di atas, maka akan diuji apakah koefisien regresi variabel-variabel tersebut signifikan atau tidak.

Jika  $F$  statistik  $>$   $F_{tabel}$  berarti secara bersama-sama variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependent atau signifikan pada  $\alpha = 5\%$  sehingga  $H_0$  ditolak. Selain itu untuk mengetahui

signifikansi menggunakan uji F dapat diketahui dari probability F statistiknya.

Hipotesis :  $H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$

$H_a : \alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \alpha_3 \neq 0$

F.tabel df1 ; df2 ,

dimana :  $df1 = K - 1$

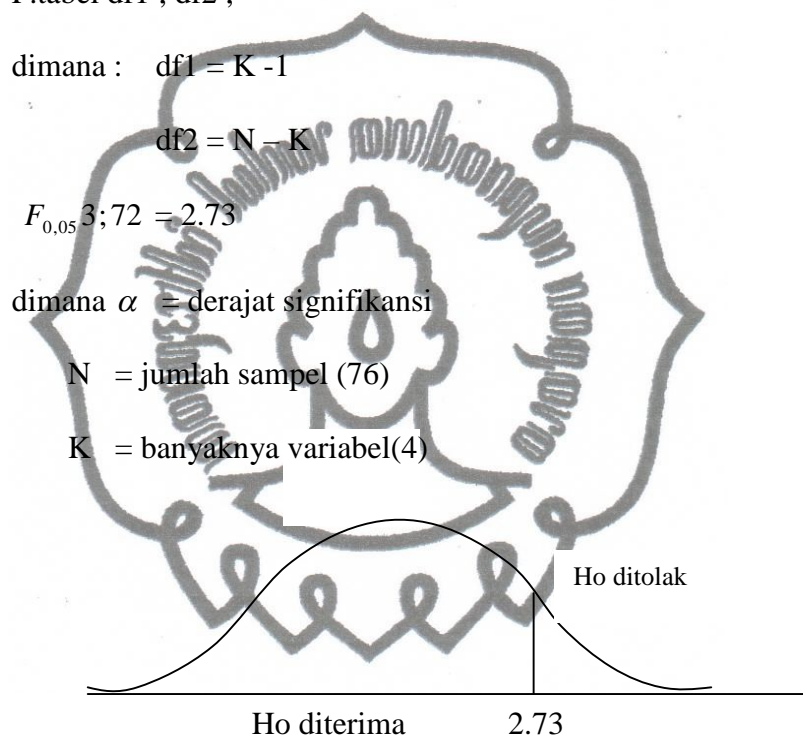
$df2 = N - K$

$F_{0,05} 3;72 = 2.73$

dimana  $\alpha$  = derajat signifikansi

N = jumlah sampel (76)

K = banyaknya variabel(4)



Gambar 4.2 Uji F

- Hasil perhitungan Uji F dengan menggunakan SPSS adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Hasil Uji F

	F hitung	F tabel	Signifikansi	Kesimpulan
Nilai F	247,039	2.73	0.000	Signifikan pada $\alpha = 5\%$

Sumber : Hasil Olah Data ( SPSS 17.0 )

*commit to user*



Berdasarkan Hasil Uji F didapatkan  $F_{hitung} = 247,039$  dengan tingkat signifikansi 0,000 yang terletak di daerah  $H_0$  ditolak, artinya variabel independen meliputi partisipasi anggota, kualitas pengurus dan peranan pemerintah secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan positif pada tingkat  $\alpha = 5\%$  terhadap variabel dependen yaitu sisa hasil usaha Koperasi Wanita Kabupaten Ngawi. Hal ini dapat dilihat juga dari tingkat signifikansinya yang kurang dari 0,05.

c. **Nilai Koefisien Determinasi  $R^2$**

Uji ini digunakan untuk mengetahui berapa persen variasi variabel dependent dapat dijelaskan oleh variabel independent. Berikut adalah hasil perhitungan koefisien determinasi ( $R^2$ ) dari pengolahan SPSS.

Tabel 4.7  
Nilai Koefisien Determinasi  $R^2$

Keterangan	Nilai
R Square	0,911
Adjusted R Square	0,908

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 17.0

Koefisien determinasi Adjusted R Square adalah sebesar 0,908 menunjukkan bahwa variasi dependent yaitu sisa hasil usaha dapat dijelaskan sebesar 90,8% oleh variabel independent yang terdiri dari partisipasi anggota, kualitas pengurus dan peranan pemerintah dan sisanya sebesar 9,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model (ei). Koefisien determinasi Adjusted R Square juga menunjukkan tingkat hubungan variasi antar variabel cukup kuat dan pemilihan ketiga variabel independent cukup tepat dalam menjelaskan sisa hasil usaha.

#### 4.4.1.2 Uji Asumsi Klasik

##### a. Normalitas

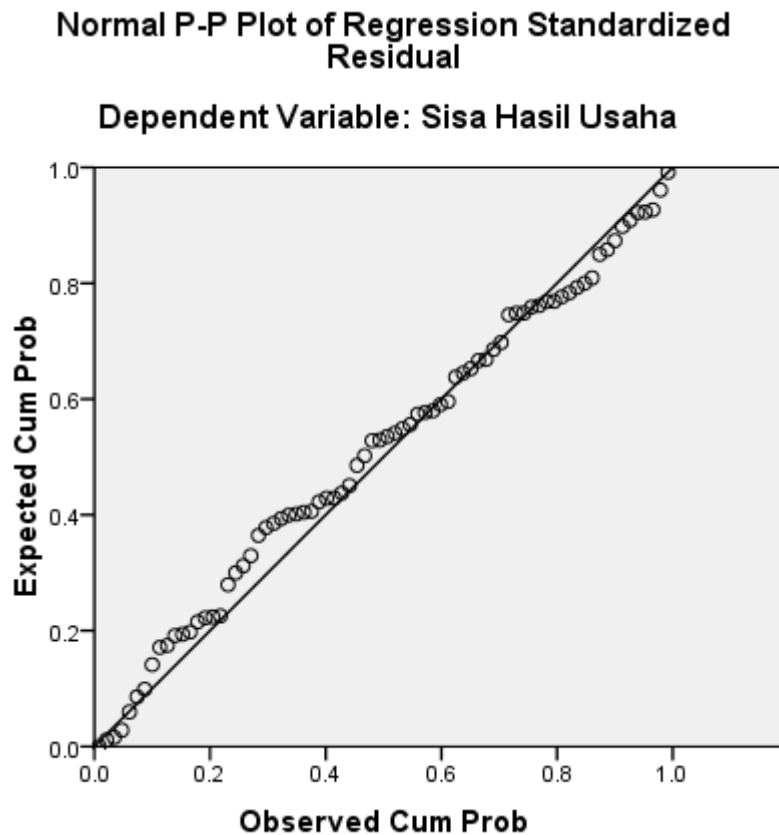
Tabel 4.8  
Hasil Uji Normalitas

	N	Skewness		Kurtosis	
		Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	76	-.526	.276	0.883	.545
Valid N (listwise)	76				

Sumber : data diolah dengan SPSS 17.0

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rasio skewness  $-0,526 / 0,276 = -0,906$  dan rasio Kurtosis  $0,883 / 0,545 = 1,620$ . Karena rasio skewness dan rasio kurtosis berada diantara -2 hingga +2, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data adalah normal.

Selain itu untuk mendeteksi normalitas pada model penelitian ini dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data pada sumbu diagonal pada suatu grafik seperti pada Gambar 4.3 Normal Probability Plot dibawah ini :



Sumber : Hasil Olah Data SPSS 17.0

Gambar 4.3.  
Normal Probability Plot

Melalui grafik di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal.

Kesimpulan: Data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Temuan ini menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan untuk memprediksi variabel sisa hasil usaha yang didasarkan pada variabel partisipasi anggota, kualitas pengurus dan peranan pemerintah.

## b. Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.

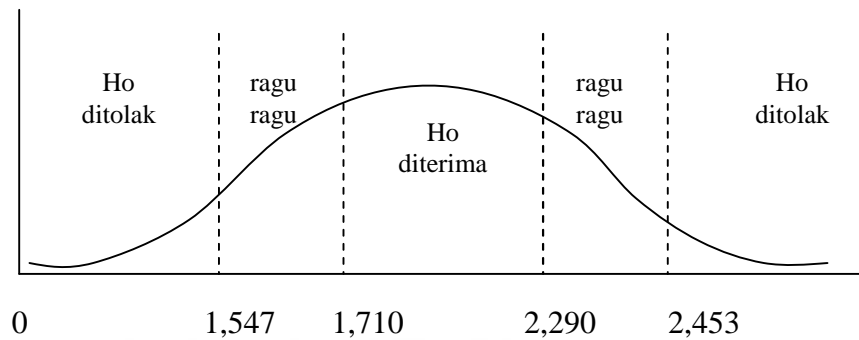
Uji ini dapat dilakukan dengan prosedur SPSS yaitu dengan melihat nilai pada kolom Durbin-Watson, seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.9  
Uji Durbin-Watson

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.955 <sup>a</sup>	.911	.908	554435.458	2.016
a. Predictors: (Constant), Partisipasi Anggota, Kualitas Pengurus, Peranan Pemerintah, b. Dependent Variable: Sisa Hasil Usaha					

Sumber : Hasil olah data dengan SPSS 17.0

Berdasarkan tabel statistik  $d$  (Durbin-Watson) pada tingkat signifikansi 0,05,  $k = 4$  dan  $n = 76$ , diperoleh nilai  $d_L = 1,547$  dan  $d_U = 1,710$ . Dengan demikian, nilai  $4-d_L = 2,453$  dan nilai  $4-d_U = 2,290$ .



Gambar 4.4  
Grafik Durbin-Watson

Nilai Durbin Watson (DW) sebesar 2,016 terletak diantara du dan 4-du yang berarti hasil pengujian menunjukkan pada daerah Ho diterima. Sehingga disimpulkan bahwa pada persamaan tidak terjadi masalah autokorelasi.

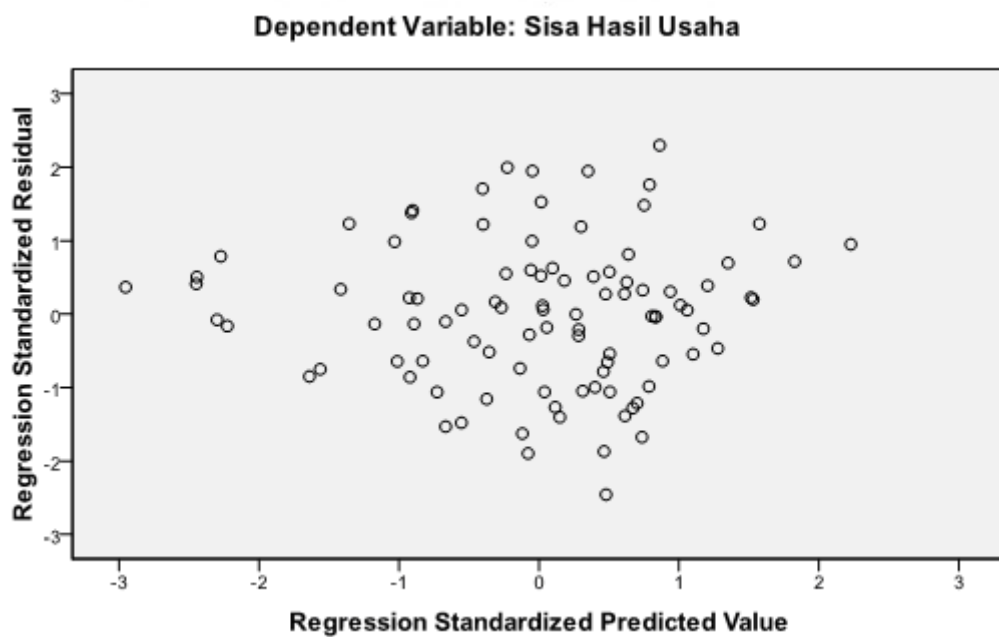
### c. Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda, maka disebut heteroskedastisitas.

Pengujian heteroskedastisitas dalam model regresi adalah penaksir (estimation) yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun dalam sampel besar, walaupun penaksir yang diperoleh menggambarkan populasinya (tidak bias) dan bertambahnya sampel

yang digunakan akan mendekati nilai sebenarnya (konsisten), hal ini disebabkan oleh variannya yang tidak minimum atau tidak efisien.

Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat pula dilakukan dengan melihat pengujian scatterplot



Gambar 4.5.  
Diagram Scatterplot

Gambar di atas adalah *scatterplot* yang menunjukkan hubungan antara *Regression Standardized Residual* dengan *Regression Standardized Predicted Value*. Pada grafik *scatterplot* ditunjukkan bahwa titik-titik yang digambarkan pada grafik tersebut menyebar dan tidak membentuk pola tertentu.

Cara membaca grafik masalah heteroskedastisitas dengan scatterplot ini bisa menjadi fatal karena pengambilan keputusan

*commit to user*

apakah suatu model terbebas dari masalah heteroskedastisitas atau tidak hanya berpatok pada pengamatan gambar saja tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Guna memperkuat masalah uji heteroskedastisitas, pada penelitian ini digunakan Uji Glejser sehingga diperoleh perhitungan seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.10  
Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	718313.839	431382.101		1.665	.100
Partisipasi Anggota	.036	.031	.140	1.168	.247
Kualitas Pengurus	-167.865	1859.478	-.011	-.090	.928
Peranan Pemerintah	-2004.672	1960.604	-.125	-1.022	.310

Sumber : Hasil Olah Data dengan SPSS 17.0

Berdasarkan Tabel 4.10 nilai t-statistik dari seluruh variabel penjelas tidak ada yang signifikan secara statistik, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Kesimpulan: Melalui pengamatan *scatterplot* maupun dengan uji Glejser diketahui bahwa pada model regresi diindikasikan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Temuan ini menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan untuk memprediksi variabel sisa hasil usaha yang didasarkan pada variabel partisipasi anggota, kualitas pengurus dan peranan pemerintah.

#### d. Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah korelasi linier yang sempurna (100%) atau eksak di antara variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model (Setiaji, 2004: 39). Jika di antara variabel penjelas ada yang memiliki korelasi tinggi maka hal ini mengindikasikan adanya problem multikolinieritas. Untuk mengetahui ada tidaknya masalah multikolinieritas yaitu dengan melihat nilai toleransi mendekati nol atau nilai inflasi variance (VIF) cenderung besar/mendekati 10 yang menunjukkan adanya masalah multikolinieritas (Gujarati,2003:372)

Tabel 4.11  
Nilai VIF dan Tolerance

Model	Tolerance	VIF
X <sub>1</sub> : Partisipasi Anggota	.935	1.069
X <sub>2</sub> : Kualitas Pengurus	.884	1.131
X <sub>3</sub> : Peranan Pemerintah	.898	1.113

Sumber : Hasil Olah Data Dengan SPSS 17.0

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance tidak mendekati nol sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas pada model tersebut.

#### 4.5 Pembahasan

Ketiga variabel independen yang dimasukkan dalam model persamaan di atas yaitu faktor partisipasi anggota, kualitas pengurus, dan peranan pemerintah, secara bersama-sama mempengaruhi sisa hasil usaha koperasi wanita Kabupaten Ngawi sebagai variabel dependen. Hal ini dapat dibuktikan melalui uji F dengan hasil pengujian hipotesis perhitungan

*commit to user*



F-hitung sebesar 247,039 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05.

Koefisien determinasi Adjusted R Square sebesar 0,908 menunjukkan bahwa variasi dependent yaitu sisa hasil usaha dapat dijelaskan sebesar 90,8% oleh variabel independent yang terdiri dari partisipasi anggota, kualitas pengurus dan peranan pemerintah dan sisanya sebesar 9,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

#### 1. Pengaruh Partisipasi Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha

Apabila faktor partisipasi anggota ( $X_1$ ) bertambah sebesar satu satuan (skor), maka akan meningkatkan sisa hasil usaha koperasi wanita Kabupaten Ngawi sebesar 1,217 satuan (1,217 skor) apabila nilai variabel yang lain tetap. Berdasarkan uji t didapatkan t-hitung sebesar 25,245 dengan nilai signifikansi 0,000 atau kurang dari 0,05, berarti terdapat hubungan yang nyata antara partisipasi anggota dengan sisa hasil usaha koperasi wanita Kabupaten Ngawi. Dengan penambahan ataupun pengurangan terhadap faktor partisipasi anggota akan memberikan pengaruh yang nyata terhadap sisa hasil usaha koperasi wanita Kabupaten Ngawi.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa partisipasi anggota menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha Koperasi Wanita Kabupaten Ngawi. Sehingga apabila anggota semakin aktif berpartisipasi dalam memajukan koperasi maka sisa hasil usaha yang dibagikan kepada anggota juga akan semakin meningkat.

Sesuai dengan pendapat Anoraga (1992:111) Partisipasi anggota merupakan kunci dari keberhasilan koperasi, sehingga peran anggota sangat penting. Anggota mempunyai wewenang mengendalikan koperasi, yaitu berperan sebagai pemilik dan sebagai pengguna jasa koperasi. Partisipasi anggota dapat diwujudkan jika anggota mengetahui hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi.

Partisipasi adalah kesediaan anggota untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk menjalankan dan mengembangkan lembaga koperasi. Demikian pula untuk koperasi, koperasi akan berfungsi dengan baik dan berhasil jika mengikut sertakan partisipasi anggota, tanpa adanya partisipasi anggota mustahil koperasi dapat berhasil dengan baik.

## 2. Pengaruh Kualitas Pengurus Terhadap Sisa Hasil Usaha

Apabila faktor kualitas pengurus ( $X_2$ ) bertambah sebesar satu satuan (skor), maka akan meningkatkan sisa hasil usaha koperasi wanita Kabupaten Ngawi sebesar 5742,004 satuan (5742,004 skor) apabila nilai variabel yang lain tetap. Berdasarkan uji t didapatkan t-hitung sebesar 1,998 dengan nilai signifikansi 0,049 atau kurang dari 0,05, berarti terdapat hubungan yang nyata antar kualitas pengurus dengan sisa hasil usaha koperasi wanita Kabupaten Ngawi. Dengan penambahan ataupun pengurangan terhadap faktor kualitas pengurus akan memberikan pengaruh yang nyata terhadap sisa hasil usaha koperasi wanita Kabupaten Ngawi.

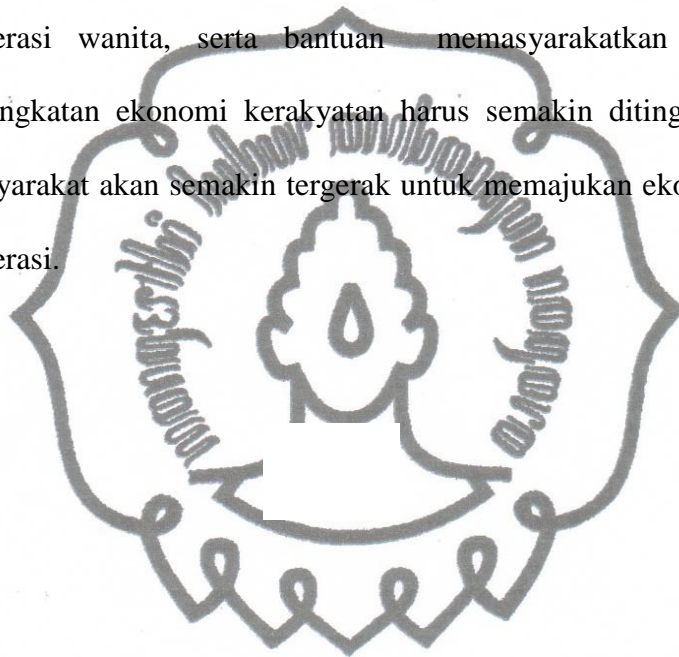
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diatas menunjukkan bahwa kualitas pengurus menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha Koperasi Wanita Kabupaten Ngawi, sehingga kualitas pengurus secara berkala harus semakin ditingkatkan antara lain melalui pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing koperasi wanita.

Partadiredja (1995:9) menyebutkan bahwa salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu Koperasi adalah Manajemen atau dengan kata lain berhasil tidaknya koperasi sangat tergantung pada kemampuan manajemen, yang dalam hal ini dapat dilaksanakan oleh pengurus ataupun manajer.

### 3. Pengaruh Peranan Pemerintah Terhadap Sisa Hasil Usaha

Apabila faktor peranan pemerintah ( $X_3$ ) bertambah sebesar satu satuan (skor), maka akan meningkatkan sisa hasil usaha koperasi wanita Kabupaten Ngawi sebesar 6645,373 satuan (6645,373 skor) apabila nilai variabel yang lain tetap. Berdasarkan uji t didapatkan t-hitung sebesar 2,193 dengan nilai signifikansi 0,032 atau kurang dari 0,05, berarti terdapat hubungan yang nyata antar peranan pemerintah dengan sisa hasil usaha koperasi wanita Kabupaten Ngawi. Penambahan ataupun pengurangan terhadap faktor peranan pemerintah akan memberikan pengaruh yang nyata terhadap sisa hasil usaha koperasi wanita Kabupaten Ngawi.

Hasil analisis diatas menunjukkan bahwa peranan pemerintah menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha Koperasi Wanita Kabupaten Ngawi. Peranan pemerintah dalam merangsang pertumbuhan koperasi wanita seperti pemberian dana hibah, pemberian kemudahan dalam perijinan, pengkoordinasian hubungan antar koperasi wanita, serta bantuan memasyarakatkan koperasi dalam peningkatan ekonomi kerakyatan harus semakin ditingkatkan, sehingga masyarakat akan semakin tergerak untuk memajukan ekonominya melalui koperasi.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan:

1. Faktor partisipasi anggota, kualitas pengurus dan peranan pemerintah secara individu mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha Koperasi Wanita Kabupaten Ngawi, sehingga setiap peningkatan salah satu variabel independen yaitu partisipasi anggota, kualitas pengurus ataupun peranan pemerintah akan menyebabkan peningkatan sisa hasil usaha Koperasi Wanita Kabupaten Ngawi. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji  $t$  yang lebih besar daripada  $t$  tabel dan signifikan di bawah 0,05.
2. Faktor partisipasi anggota, kualitas pengurus dan peranan pemerintah secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha Koperasi Wanita Kabupaten Ngawi. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji  $F$  yang lebih besar daripada  $F$  tabel dan signifikan di bawah 0,05.
3. Faktor partisipasi anggota lebih berpengaruh terhadap sisa hasil usaha Koperasi Wanita Kabupaten Ngawi dibandingkan faktor peranan pemerintah dan kualitas pengurus, sehingga peranan pemerintah sebagai pembina koperasi dan pengurus sebagai pelaksana manajemen koperasi

harus lebih ditingkatkan agar ketiga variabel tersebut dapat seimbang demi kemajuan usaha koperasi.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan hasil analisis, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Partisipasi anggota sebagai kunci keberhasilan koperasi wanita harus selalu ditingkatkan antara lain melalui :
  - a. Pendidikan kepada anggota yang dapat dilakukan oleh pengurus, pemerintah ataupun pihak ketiga, sehingga diharapkan anggota lebih mengetahui hak dan kewajibannya.
  - b. Pemberian bunga simpanan yang bisa bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya, sehingga diharapkan partisipasi anggota sebagai pemilik melalui simpanan akan lebih meningkat.
  - c. Pemberian bunga pinjaman rendah dan penjualan barang-barang yang harganya bisa bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya, sehingga diharapkan partisipasi anggota sebagai pelanggan dalam menggunakan jasa koperasi wanita akan lebih meningkat dan secara tidak langsung akan meningkatkan volume usaha.
2. Kualitas pengurus dalam manajemen dan melayani anggota dapat ditingkatkan antara lain melalui :
  - a. Pembinaan dan Pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pengurus oleh pemerintah dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian

Kabupaten Ngawi dilaksanakan secara berkala, bertahap dan berkesinambungan.

- b. Studi banding ke Koperasi Wanita lain yang telah maju dan berkembang, sehingga dapat menambah wawasan pengurus dalam mengembangkan usaha koperasi dan secara tidak langsung akan meningkatkan volume usaha yang pada akhirnya akan menambah sisa hasil usaha koperasi.
3. Peranan pemerintah dalam peningkatan sisa hasil usaha koperasi dapat dilakukan melalui :
  - a. Memantau Sisa Hasil Usaha Koperasi secara berkala melalui laporan keuangan koperasi yang bersangkutan,
  - b. Melakukan pemeriksaan secara menyeluruh baik yang menyangkut organisasi maupun usahanya, termasuk pelaksanaan program pembinaan anggota,
  - c. Memberikan kemudahan untuk memperkuat permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi.
  - d. Membantu pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerjasama saling menguntungkan antar koperasi.
  - e. Bekerjasama dengan pihak ketiga (investor) dalam pemasaran hasil usaha anggota koperasi sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesetiaan anggota kepada koperasi. Apabila anggota terus bertransaksi melalui koperasi maka volume usaha koperasi akan bertambah yang pada akhirnya akan menambah sisa hasil usaha koperasi.